

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ)  
BIDANG SARANA INFRASTRUKTUR DI DESA BANGUN  
HARJO JAYA KECAMATAN PULAU BURUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Mohamad Arifin  
NPM : 147110498**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
PEKANBARU  
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Mohamad Arifin  
NPM : 147110498  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)  
Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya  
Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pembimbing I

Pekanbaru, 17 Januari 2022

Pembimbing II

Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si

Andri Kurniawan, B.PM., M.Si

Turut Menyetujui:  
Program Studi Administrasi Publik

Ketua,

Lilis Suryani S.Sos., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Mohamad Arifin  
NPM : 147110498  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)  
Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya  
Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 17 Januari 2022

Ketua



Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Anggota,



Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si

Anggota,



Andri Kurniawan, B.PM., M.Si

Anggota,



Arief Rifa'i, S.Sos., M.Si

Mengetahui,  
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mohamad Arifin  
NPM : 147110498  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)  
Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya  
Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 17 Januari 2022

Ketua

An. Tim Penguji  
Sekretaris



Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si



Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Administrasi Publik  
Ketua,



Indra Satri, S.Sos., M.Si



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1692/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
  2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** :
1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
  2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
  3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
  4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
  5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Mohamad Arifin  
N P M : 147110498  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya ( DMIJ ) Bidang Sarana Infrastruktur Di Desa Bangun Harjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir

**Struktur Tim :**

1. Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Eko Handrian, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr.H. Moris Adidi Yogia, M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Arief Rifai H, S.Sos., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 22 Desember 2021  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK. 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. Arsip -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

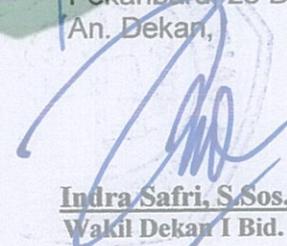
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1692/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 22 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 23 Desember 2021 jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Mohamad Arifin  
NPM : 147110498  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya ( DMIJ ) Bidang Sarana Infrastruktur Di Desa Bangun Harjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir

Nilai Ujian : Angka : "76,75" ; Huruf : "B+"  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si..	Ketua	1. 
2.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr.H. Moris Adidi Yogia, M.Si	Anggota	3. 
4.	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Anggota	4. 
5.	Arief Rifai H, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd	Notulen	6. 

Pekanbaru, 23 Desember 2021  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR**  
**Nomor: 939/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang :**  
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**  
**DEKAN FISIPOL UIR**

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen pembimbing;  
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. SK Mendiknas. No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
4. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;  
5. SK Rektor No. 112/UIR/KPTS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan: Rekomendasi Kajur. dan WD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

I Nama : Dr. H. Moris Adidi Yogia.,M.Si  
NIP/NPK : 132315043  
Pangkat/Jabatan : III/c - Lektor  
Kedudukan : Pembimbing I

II Nama : Andri Kurniawan, B.PM., M.Si  
NIP/NPK : 1014068604  
Pangkat/Jabatan : III/b – Ass. Ahli  
Kedudukan : Pembimbing II

Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : **Muhamad Arifin**  
NPM : 147110498  
Program Studi : Ilmu Administasi / Administrasi Publik.  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya ( DMIJ ) Bidang Sarana Infrastruktur Di Desa Bangun Harjo Jaya, kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada SK Dekan No. 001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.

Kutipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 19 Oktober 2018  
An. Dekan,

**H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.**  
Wakil Dekan I/Bid. Akademik



Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi Adm. Publik
3. Yth. Ka. Labor Adm. Publik
4. Arsip. --.SK Pembimbing.

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan bersyukur atas limpahan rahmat-Mu ya Allah, segala petunjuk dari-Mu menuntunku menuju kejalan-Mu. Rasa cinta dan kasih yang tulus selama ini menyertai perjalananku, serta berfikir otakku. Pelajaran berharga dalam hidupku yang akan membuatku selalu tegar hingga membuatku semakin melihat betapa besarnya keagungan-Mu Ya Allah.*

*Sembah sujudku dan seiring syukur pada-Mu ya Allah, Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku kepada orang yang paling aku cintai dan aku sayangi, kepada Ayahku dan Ibuku.....*

*Tak terbilang rupiah, waktu, tak terhitung jerih payah, tak terhapus cucuran keringat yang mengalir, dan tak ada hentinya untaian do'a yang selalu engkau persembahkan untukku agar aku dapat bersekolah tinggi menggapai impian dan cita-citaku, itu semua takkan pernah terbalaskan.....*

*Serta untuk semua teman-teman seangkatan prodi Administrasi Publik Angkatan 2014 yang seperjuangan denganku. Terima kasih atas bantuan dan saran dari kalian dan selalu menjadi pendengar keluh kesah ku, tanpa kalian aku takkan bisa sampai ke titik ini....*

*Ini bukanlah akhir dari perjuanganku, tapi ini adalah awal dari kesuksesanku. Terima kasih untuk semutanya.....*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul **“Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Eko Handriyan, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberi motivasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar serta mengarahkan penulis guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Andri Kurniawan, B.PM., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar serta mengarahkan penulis guna penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
8. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
9. Pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi yang akurat serta respon yang sangat baik.
10. Terkhusus dan teristimewa penulis persembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan semangat serta dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Riau.

11. Keluarga Besar Administrasi Publik Angkatan 2014 terutama Kelas D yang selama ini menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis memohon dan berdo'a kepada yang maha kuasa semoga jasa baik mereka semua dibalas dengan rahmat dan pahala yang setimpal serta mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu, penulis sudah berupaya semaksimal mungkin mengerahkan tenaga dan pikiran penulis untuk membuat skripsi ini dengan sebaik mungkin. Terlepas dari itu, kritik dan saran yang bersifat positif penulis harapkan dari semua pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap kepada seluruh pihak yang bersangkutan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis dan umumnya untuk pembaca yang budiman. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 17 Januari 2022  
Penulis  
Ttd.

Mohamad Arifin

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>SK PENGUJI UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	xvii
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>ABSTRACT</b> .....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	8
A. Studi Kepustakaan.....	8
1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik.....	8
2. Konsep Organisasi.....	13
3. Konsep Manajemen.....	15
4. Konsep Pelaksanaan.....	17
5. Konsep Administrasi Pembangunan.....	20
6. Konsep Pemerintahan Desa.....	22
7. Konsep Otonomi Daerah.....	26
8. Konsep Program Desa Maju.....	28
9. Konsep Pembangunan dan Pembangunan Desa.....	38
10. Konsep Perencanaan Pembangunan Desa.....	42
B. Kerangka Pikir.....	44
C. Konsep Operasional.....	44
D. Operasional Variabel.....	46
E. Teknik Pengukuran.....	48
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	50
A. Tipe Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50

C. Populasi dan Sampel.....	51
D. Teknik Penarikan Sampel.....	51
E. Jenis dan Sumber Data .....	52
F. Teknik Pengumpulan Data .....	52
G. Teknik Analisis Data .....	54
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	54
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian .....	55
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir.....	57
1. Keadaan Geografis.....	57
2. Demografi .....	59
3. Fisiografi.....	59
4. Sosial Budaya .....	60
B. Gambaran Umum Kecamatan Pulau Burung .....	61
C. Gambaran Umum Desa Bangun Harjo Jaya.....	66
1. Visi dan Misi Desa Bangun Harjo Jaya .....	67
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya .....	67
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya....	68
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. Identitas Responden.....	71
1. Jenis Kelamin.....	71
2. Tingkat Pendidikan .....	72
3. Tingkat Usia.....	73
B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir .....	74
1. Penyusunan Rencana .....	74
2. Penetapan Rencana .....	78
3. Pelaksanaan Rencana.....	81
4. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana.....	84
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir .....	92
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL

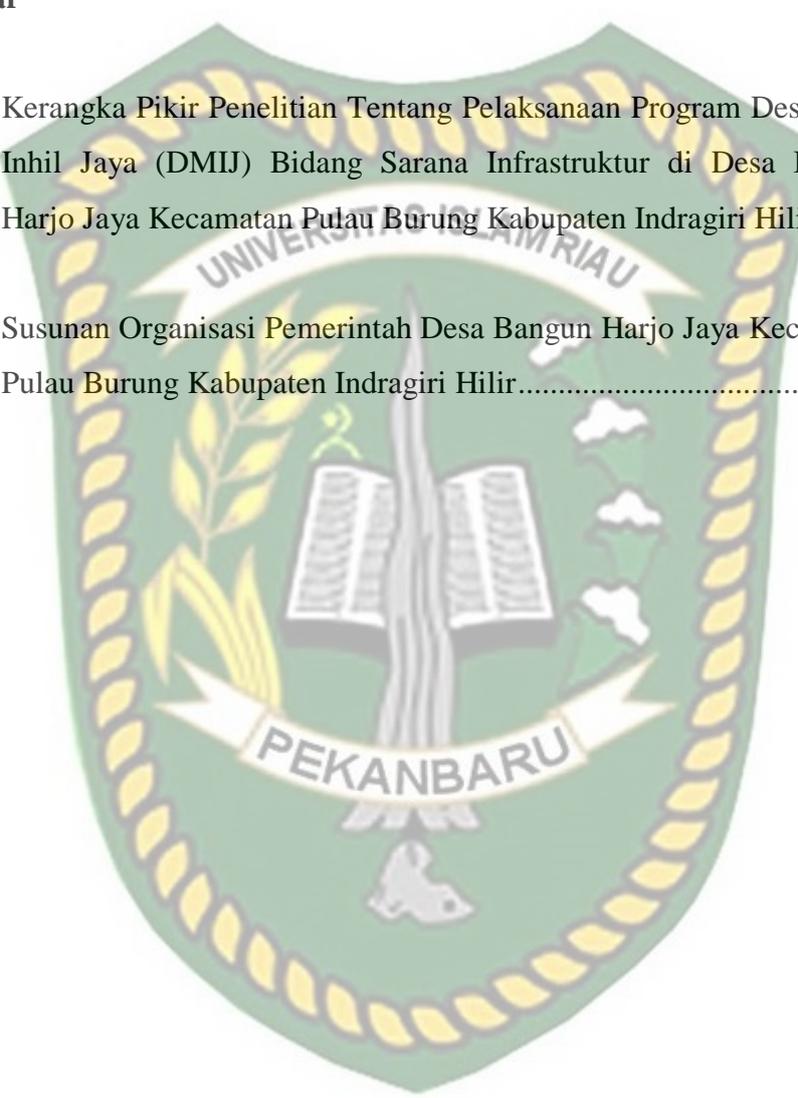
<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1 : Rencana Kerja Anggaran Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tahun 2017 dan 2018 .....	4
II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian tentang Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir .....	48
II.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.....	56
V.1 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Jenis Kelamin .....	71
V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	72
V.3 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Tingkat Usia .....	73
V.4 : Distribusi Tanggapan Responden tentang Indikator Penyusunan Rencana terhadap Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.....	75
V.5 : Distribusi Tanggapan Responden tentang Indikator Penetapan Rencana terhadap Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.....	78
V.6 : Distribusi Tanggapan Responden tentang Indikator Pelaksanaan Rencana terhadap Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.....	81

V.7 : Distribusi Tanggapan Responden tentang Indikator Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana terhadap Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.....	83
V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir .....	88



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.....	45
IV.1 : Susunan Organisasi Pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner tentang Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir .....	99
2. Daftar Wawancara untuk Kepala Desa tentang Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.....	102
3. Daftar Telly Penelitian tentang Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir .....	107
4. Dokumentasi Foto Penelitian tentang Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir .....	108

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Arifin  
NPM : 147110498  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Januari 2022  
Pelaku Pernyataan,

Mohamad Arifin

**PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ) BIDANG SARANA INFRASTRUKTUR DI DESA BANGUN HARJO JAYA KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**ABSTRAK**

**Oleh  
Mohamad Arifin**

Kata Kunci : Pelaksanaan, Program Desa Maju Inhil Jaya, Infrastruktur;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir. Indikator penilaian yang dipergunakan meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana, dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif dengan analisa kuantitatif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini berjumlah 44 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data terdiri dari data primer dikumpulkan menggunakan teknik kuisisioner dan wawancara, serta data sekunder dikumpulkan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisa data menggunakan tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dikategorikan Cukup Terlaksana. Faktor penghambatnya yaitu pagu dana dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak mencukupi dari anggaran pada program DMIJ untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, sehingga menjadi sedikit terhambat proses pelaksanaan pembangunannya. Kemudian terjadi keterlambatan dalam pengesahan APBDes Desa Bangun Harjo Jaya, sehingga proses pelaksanaan program DMIJ bidang pembangunan sarana infrastruktur menjadi molor dan lama. Dan faktor cuaca ketika hujan turun, yang mengakibatkan para pekerja tidak dapat bekerja dan akses jalan pun menjadi rusak karena kondisi jalan masih tanah, sehingga pengangkutan material menjadi terhambat. Selain itu material juga sulit didapat karena akses Desa Bangun Harjo Jaya lumayan jauh jaraknya dari kecamatan dan kabupaten.

**THE IMPLEMENTATION OF THE INHIL JAYA ADVANCED VILLAGE PROGRAM (DMIJ) FOR INFRASTRUCTURE FACILITIES IN BANGUN HARJO JAYA VILLAGE, PULAU BURUNG DISTRICT, INDRAGIRI HILIR REGENCY**

**ABSTRACT**

By  
**Mohamad Arifin**

*Keywords: Implementation, Inhil Jaya Maju Village Program, Infrastructure;*

*This study aims to determine and analyze the Implementation of the Inhil Jaya Advanced Village Program (DMIJ) for Infrastructure Facilities in Bangun Harjo Jaya Village, Pulau Burung District, Indragiri Hilir Regency. The assessment indicators used include planning, determining plans, implementing plans, and evaluating the results of implementing plans. This type of research is a descriptive survey with quantitative analysis, which prioritizes a list of questionnaires as a data collection tool. The population and sample in this study amounted to 44 people. The types and techniques of data collection consist of primary data collected using questionnaires and interviews, and secondary data collected using observation and documentation techniques. While the data analysis technique uses a frequency table. Based on this analytical technique, the researchers assessed and concluded that the Implementation of the Inhil Jaya Advanced Village Program (DMIJ) in the Infrastructure Facilities Sector in Bangun Harjo Jaya Village, Pulau Burung District, Indragiri Hilir Regency was categorized as Sufficiently Implemented. The inhibiting factor is that the funding ceiling from the Indragiri Hilir Regency Government is not sufficient from the budget for the DMIJ program for infrastructure development activities, so that the implementation process of its development is slightly hampered. Then there was a delay in the ratification of the APBDes of Bangun Harjo Jaya Village, so that the process of implementing the DMIJ program in the field of infrastructure facilities development was delayed and took a long time. And the weather factor when it rains, which causes the workers to be unable to work and the road access becomes damaged because the road condition is still dirt, so that the transportation of materials is hampered. In addition, materials are also difficult to obtain because the access to Bangun Harjo Jaya Village is quite far from the sub-district and district.*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pandangan mengenai kebijakan setidaknya memuat unsur keinginan dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat sebagai salah satu unsur yang mendukung kepemimpinan pada tatanan politik menghak dukungannya didalam kontestasi pemilihan umum. Seterusnya dukungan tersebut diwujudkan dalam kebijakan publik, termuat dalam gagasan rencana, program, regulasi dan proyek.

Kabupaten Indragiri mempunyai program unggulan yang dijabarkan didalam Peraturan Daerah Indragiri Hilir no 5 tahun 2015. Program ini dikenal dengan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Semangan misiatif dari program ini yang termuat dalam regulasi ini sebagai upaya mengangkat kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat dengan semangat mendorong kemandirian. Adapun jenis kegiatan program (DMIJ) adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan penunjang oprasional pemerintah desa, pelayanan kepada masyarakat desa serta kegiatan kelembagaan desa.
2. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana desa yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun panjang .
3. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat.
4. Kegiatan peningkatan kelompok usaha ekonomi masyarakat.

Program DMIJ ini merupakan program unggulan yang telah mengalami penyempurnaan dari program desa sebelumnya. Program DMIJ disusun berdasarkan tipologi Desa, pendataan keadaan Desa, skala prioritas untuk melakukan pembangunan desa, karena setiap desa mempunyai karakteristik dan keahlian tersendiri. Diberlakukannya UU nomor 6 tahun 2016 tentang desa menentukan batas-batas kewenangan desa. Untuk mengefektifkan peran desa sesuai dengan pasal 13 UU nomor 6 tahun 2016, upaya yang dilakukan desa seperti rekognisi, subsugnititas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi. Upaya pemerintah Kab. Indragiri Hilir Riau dalam melakukan sinkronisasi dengan pemerintah desa diperjelas dengan misi RPJMD 2013-2018, dimana terdapat unsur upaya untuk “meningkatkan pelaksanaan demokrasi yang didukung penyeteraan gender dan perlindungan anak, semangat kegotongroyongan, kekeluargaan, ketentraman dan ketertiban serta mendukung supremasi hukum”.

Sasaran dan jenis kegiatan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), lebih berupaya mempertegas peran masyarakat untuk dapat menentukan sendiri pembangunan apa yang akan dilakukan di desanya. Menurut Sufian, 69:2008 “peran serta masyarakat tidak hanya terbatas pada bidang tertentu saja, melainkan termasuk kepada semua pembangunan ekonomi, politik, sosial budaya dan harkon. Singkatnya kemajuan ekonomi suatu masyarakat tidak akan mampu bertahan, tanpa adanya pembangunan demokrasi politik dalam masyarakat tersebut.

Dengan adanya program DMIJ, diharapkan desa-desa yang berada di wilayah Indragiri Hilir mampu maju dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya terlaksanaa meningkatkan pembangunan desa. Pembangunan daerah selama ini

termasuk gagal dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial yang cukup lebar yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai akibat tidak menatanya sumber-sumber produksi (Sofian, 70:2008). Kegiatan program desa mandiri pada dasarnya merupakan bentuk kegiatan yang mendukung kepada program kepemimpinan sebelumnya K2I (Kemandirian, Kebodohan dan Infrastruktur) Provinsi Riau.

Infrastruktur memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak perubahan ekonomi dan pembangunan pedesaan. Imcoln Arsyad (10,2011), masalah keterbatasan infrastruktur baik itu infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial di pedesaan memang sudah menjadi masalah klasik dalam pembangunan pedesaan. Infrastruktur memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak ekonomi dan pembangunan pedesaan. keberadaan infrastruktur yang sangat memadai diperlukan, sarana dan prasarana fisik sangat diperlukan dalam sistem pelayanan masyarakat.

Sejak terbentuknya Kab. Indragiri Hilir, pembangunan infrastruktur yang selama ini yang dilakukan belum merata. Pada dasarnya program DMIJ bertujuan untuk menyediakan segala hal yang diperlukan oleh masyarakat yang ada di desa. Namun, upaya memfasilitasi masyarakat untuk membangun desa, masih belum banyak tersentuh salah satunya di desa Bangun Harjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung.

**Tabel I.1 : Rencana Kerja Anggaran Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tahun 2017 dan 2018**

No	Kegiatan Pembangunan	Lokasi	Jumlah	Tahun	Sumber Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Jalan KUT 2 Jalan Bukit Intan Raya	Dusun 1	Rp. 86.041.000	2017	APBDes	Terealisasi
2	Pembangunan Jalan Flamboyan	Desa Bangun Harjo Jaya	Rp. 84.979.650	2017	ADD/DMIJ	Terealisasi
3	Pembangunan Jalan Depan Balai Pengobatan	Desa Bangun Harjo Jaya	Rp. 30.342.300	2017	Dana Desa	Belum Terealisasi
4	Pembangunan Rabat Beton Depan Kantor Desa	Jl. Kantor Desa	Rp. 24.170.000	2017	ADD/DMIJ	Terealisasi
5	Pembangunan Jembatan Beton	Jl. Bukit Intan Raya	Rp. 265.000.000	2018	ADD/DMIJ	Terealisasi
6	Semenisasi Lapangan Bola Volley	Jl. Flamboyan	Rp. 87.672.000	2018	Dana Desa	Terealisasi
7	Pembangunan Taman Belajar Keagamaan	Jl. Bukit Intan Raya	Rp. 198.570.000	2018	ADD/DMIJ	Terealisasi
8	Normalisasi KUT	Jl. Bukit Intan Raya KUT 2	Rp. 46.980.000	2018	Dana Desa	Belum Terealisasi

*Sumber : Kantor Desa Bangun Harjo Jaya, Tahun 2020.*

Dari data tabel 1.1, didapati bahwa dua rencana kerja yang belum diselesaikan atau belum terealisasi. Datanya adalah pembangunan jalan depan balai pengobatan tahun 2017 dan Normalisasi KUT di tahun 2018. Sumber dana yang dimaksudkan ditentukan secara persial diluar dana DMIJ yaitu diperoleh dari sumber murni Dana Desa Bangun Harjo Jaya, Kec. Pulau Burung.

Menurut informasi dari program DMIJ, Desa Bangun Harjo Jaya Kec. Pulau Burung merupakan salah satu desa yang ada didalam daftar yang melaksanakan

Program DMIJ. Akan tetapi ditemui bahwa dua target ralisasi di tahun 2017 dan 2018 mengenai pembangunan jalan dan KUT masih belum optimal.

Semangat kebijakan yang berhubungan dengan realisasi pembangunan sangat ditentukan oleh kepemimpinan Kepala Desa. Menurut pendapat Sofian 68:2008, dalam Demokrasi, pembangunan dan keadilan sosial menyatakan bahwa pembangunan sosial ( *Social Building*), dalam rangka pembangunan sumberdaya manusia tidak terlepas dari bagaimana menciptakan sistem sosial yang dapat mendorong lahirnya manusia yang kreatif atau manusia berprestasi, termasuk pula sikap mental masyarakat dan aparatur Pemerintah.

Dilihat dari dinamika, pembangunan Desa Bangun Harjo Jaya terbatas dari pengembangan sumberdaya manusia, aparatur desa dan masyarakat yang terbatas. Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan desa yang optimal diperlukan unsur pemerintahan yang profesional, dimana mampu memenuhi harapan Good Governance. Good Governance memiliki sembilan (9) aspek fundamental (asas) diantara yang perlu diperhatikan menurut lembaga administrasi negara (LAN).

1. Partisipasi ( participation )
2. Penegakan hukum ( rule of law )
3. Transparansi ( transparancy )
4. Responsif ( responsiveness )
5. Orientasi kesepakatan ( consensur orientation )
6. Ketaraan ( equity )
7. Efektif dan Efisien ( Effectiveness dan efficiency )
8. Akuntabilitas ( Accountability )

## 9. Visi strategis ( strategic visiion )

(A . Ubaedillah, 200:2013)

Sejak terbentuknya Kabupaten Indragiri Hillir melalui surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 tanggal 27 April 1965, pembangunan infrastruktur yang selama ini belum berlangsung secara optimal dilakukan di Desa Bangun Harjo. Pembangun yang dilakukan masih terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten Tembilahan, sementara pulau-pulau kecil yang masih banyak belum tersentuh, salah satunya Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung.

Ditinjau dari aspek potensi sumberdaya alam seperti pertanian, desa bangun harjo Jaya Kecamatan Pulau burung mempunyai perkenunan Kelapa Hibrida, perkebunan karet, perkebunan nanas, perkebunan ubi, dan rambutan. Dimana mayoritas bermata pencarian masyarakat Desa Bangun Harjo Jaya Kec. Pulau Burung bermata pencarian sebagai petani, namun jika dilihat dari aspek demografi desa yang relatif jauh dan terpencil mengakibatkan lahan pertanian menjadi menurun dan tidak menguntungkan.

Program DMIJ bagi Desa menurut pedoman Program DMIJ terbagi menjadi empat kategori :

1. Desa Swadaya
2. Desa Swasembada
3. Desa Swakarya
4. Desa Maju

Pengelompokan ini dinilai dari beberapa aspek kepadatan penduduk, keadaan alam, letak desa dan kemajuan Desa.dalam mengenakan masyarakat dalam membangun diperlukan partisipasi kemampuan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan. Kepala Desa memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan semua program yang dilaksanakan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir?”**.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu : **“Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.”**

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil peneliitian di bidang administrasi, khususnya administrasi publik.

- b. Kegunaan akademis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
- c. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya dalam membangun sarana dan prasarana pembangunan desa.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Administrasi Publik

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti membantu, melayani atau memenuhi, serta *administration* yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pemimpin dan pemerintahan, pengelolaan (dalam Syafri, 2012;3).

Administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang defenisinya tidak terbatas. Administrasi dalam arti luas yakni proses (rangkaian) kegiatan usaha kerja sama secara sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Sebagai proses administrasi menggambarkan berjalannya suatu kegiatan kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan konsep administrasi dalam arti sempit yakni sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespodensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya (Zulkifli, 2014:9).

Selain itu, administrasi juga memiliki arti sebagai ketatausahaan yang dalam bahasa inggrisnya dipergunakan istilah *office administration*, *clerical work*, *paper work*, *office work* atau lebih tepatnya administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau dikeluarkan oleh organisasi/ institusi. Sedangkan dalam arti luas

administrasi adalah suatu proses (rangkaian) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien (Syafri,2012:3).

Untuk mencapai suatu tujuan pemerintahan dan dalam hal ini adalah pembangunan desa maka dibutuhkan kerja sama antara organ-organ yang ada pada pemerintahan dan masyarakat. Administrasi merupakan langkah yang penting agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan sosial.

Dalam literatur sampai saat ini, arti administrasi beraneka ragam, tergantung dari sudut mana ahli yang bersangkutan melihatnya. Beberapa pendapat tentang definisi administrasi dari beberapa orang ahli yaitu :

- a. Atmosudirjo (2013;21) : Administrasi adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya.
- b. Siagian (1992;2) : Administrasi yaitu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Menurut Ordway Tead (dalam Silalahi. 1992;10) : Administrasi adalah penataan dari kegiatan individu-individu – eksekutif – dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur,memajukan dan menyediakan sarana dan prasarana bagi upaya-upaya kerjasama sekelompok individu-individu untuk merealisasikan beberapa tujuan yang telah ditentukan.

Memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai objek studi ilmu administrasi, maka terdapat sepuluh dimensi penting yang perlu dipahami dalam konsep administrasi (Atmosudirjo,2003;51-55) yaitu:

1. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam suatu organisasi.
2. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa organisasi yang sehat maka organisasi tidak akan sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai kekuatan atau energi atau hayat adalah '*administrator*' yang harus pandai menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas para manajer, staffer, dan personil lainnya.
3. Administrasi merupakan suatu fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terupama para manajer dan staffer.
4. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan '*badan pimpinan*' dari pada suatu organisasi.
5. Administrasi merupakan suatu seni (art) yang merupakan bakat, ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
6. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai tujuan

tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara dan melalui organisasi.

7. Administrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial yang tertentu yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu tipe tingkah laku manusia tertentu.
8. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tatacara yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan sesuatu, yang memerlukan kemampuan, kemahiran, keterampilan, yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
9. Administrasi merupakan suatu sistem yang tertentu, yang memerlukan input, transformasi, pengolahan dan output tertentu.
10. Administrasi merupakan suatu tipe manajemen tertentu yang merupakan 'overall management' daripada suatu organisasi.

Secara teoritik pengertian administrasi melayani secara intensif, sedangkan secara etimologis administrasi dalam bahasa inggris "*administer*" yaitu kombinasi dari kata latin yang terdiri dari Ad dan ministrare yang berarti "*to serve*" melayani, membantu, dan memenuhi. Lebih jelas lagi kata Ad artinya intensif sedang ministrare bentuk kata benda yang berarti melayani, membantu atau mengarahkan (Sagala, 2007;40).

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005;24) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk

memipin dan mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana urusan yang berlangsung didalamnya.

Selanjutnya Zulkifli (2014;14-15) menyatakan bahwa administrasi bertitik tolak dari terioritas batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun luas (keseluruhan proses kerjasama), menunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektifitas dan efesiensi organisasi, aspek-aspek yang dimaksud meliputi :

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Kepemimpinan
4. Pengambilan keputusan
5. Human Relation
6. Informasi
7. Sumber Daya.

Dengan demikian administrasi adalah proses (rangkaiian) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Darwis (2009;12) mengatakan bahwa administrasi publik merupakan semua kegiatan dan tingkatan yang dilakukan untuk mengatur urusan-urusan negara yang menyangkut kepentingan negara yang bersangkutan.

Secara sederhana administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik seperti departemen-departemen dan dinas-dinas mulai tingkat desa hingga tingkat pusat.

## 2. Konsep Organisasi

Organisasi berasal dari orgonon dan istilah latin organum yang dapat berarti alat, bagian, anggota atau badan. Organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan. Dalam literatur sampai saat ini menurut Hamim dan Muchlis (2005;13-14), arti organisasi beraneka ragam, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Stephen P. Robbins (1990;4) pemahaman terhadap organisasi diartikan sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar,dengan sebuah batasan yang relatif dapat didefinisikan,bekerja atas dasar relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.
- b. Menurut Gereth R.Jones (1994;4) Jones memahami sebuah organisasi adalah alat yang digunakan orang-orang, baik secara individual maupun kelompok untuk mencapai bermacam tujuan.
- c. Menurut Vesting et.all (1976;27) pandangan Vesting dkk ini,bahwa organisasi diperlukan apabila orang-orang bergabung berusaha mencapai beberapa tujuan bersama. Jadi, organisasi dibentuk karena orang-orang tersebut ada tujuan yang akan dicapai.
- d. Menurut James D Mooney dalam Sutarto(1998;23) Mooney memahami organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia atau pencapaian suatu tujuan bersama.
- e. Menurut Jhon D. Millet dalam Sutarto (1998;23)Millet memahami organisasi adalah orang-orang yang bekerja sama dan dengan demikian, ini mengandung ciri-ciri dalam hubungan manusia yang timbul dalam aktivitas kelompok.

Menurut Zulkifli dan Moris A.Yogia (2014;78) organisasi dalam arti luas tentulah tidak sederhana itu. Sebagai locus dan focus studi Ilmu Administrasi, organisasi dapat dijabarkan dari banyak aspek sumberdaya serta faktor lingkungan yang melingkupinya. Kajian dari multi aspek tersebut melatarbelakangi beragam definisi organisasi yang telah ditulis oleh para sarjana dan pakar. Terutama mereka yang memandang organisasi sebagai sistem, menilai adanya keterkaitan antara dinamika organisasi dengan berbagai unsur yang melingkupinya. Melalui pendekatan struktur Siagian (1986;7) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang dianggap atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Gitosudarno (2000;1) organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Gomes (2003;23) organisasi tidak lebih dari pada sekelompok orang yang berkumpul bersama di sekitar teknologi yang dipergunakan untuk mengubah input-input dari lingkungan menjadi barang atau jasa yang dapat dipasarkan.

Selanjutnya menurut Siagian (1986;7) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam ikatan yang

terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang sekelompok orang yang disebut bawahan.

Untuk mencapai tujuan pengorganisasian itu, maka pada saat pelaksanaannya perlu dilengkapi dengan kebijakan yang berorientasi kepada terintegrasinya seluruh pekerjaan personil kepada terintegrasinya seluruh pekerjaan personil organisasi. Seperti diungkapkan oleh Messie (1985:71), bahwa metode pengorganisasian memusatkan perhatiannya pada struktur dan proses alokasi tugas, serta sasaran-sasaran umum agar dapat dicapai.

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Menurut Fahmi (2013:1) Organisasi Publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.

Sedangkan menurut Robbins dalam Fahmi (2013:2), organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

### **3. Konsep Manajemen**

Menurut Stoner (dalam Zulkifli, 2014:17) mengatakan manajemen merupakan proses merencanakan, menggerakkan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggambarkan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah kegiatan dengan melekat orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta dilaksanakan secara berurutan kegiatan kearah satu tujuan.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut George R. Terry (dalam Sarwoto,1983;46) adalah sebagai berikut :

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Organisasi)
3. *Staffing* (Kepegawaian)
4. *Motivating* (Motivasi)
5. *Cotrolling* (Pengawasan)

Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli, 2005;28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Pembuatan keputusan
3. Pengarahan
4. Pengorganisasian
5. Pengawasan
6. Penyempurnaan

Selanjutnya manajemen sangat dibutuhkan dalam kehidupan organisasi dengan 3 (Tiga) alasan pokok sebagaimana dikemukakan Siagian (1986;5) sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai tujuan organisasi
- b. Menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, serikat kerja, asosiasi perdagangan masyarakat dan pemerintah.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas.

Manajemen Publik Menurut Shafriz dan Russel (dalam Keban, 2008;93) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi.

Manajemen Publik atau dapat juga disebut Manajemen Pemerintahan secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkaat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan dari manajemen sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta.

#### **4. Konsep Pelaksanaan**

Jika dikaitkan dengan penjelasan Administrasi dan Manajemen, ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam proses administrasi dan manajemen. Karena administrasi merupakan segenap aktivitas kerja pegawai yang bersangkutan dengan penggunaan tenaga kerja secara sendiri memiliki hubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian dapat diterjemahkan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi merupakan implementasi dari penerapan proses administrasi dan manajemen.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi yang paling mendasar. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi

*actuating* (pelaksanaan) justru lebih menekankan pada kegiatan yang bergunungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Van Matter dan van Horn (dalam Agustino,2012 :139) pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Terry (1986:27) pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran angora-anggota perusahaan tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (program), maka sangat bergantung kepada implementasi program itu sendiri. Dimana pelaksanaan menyangkut tindakan seberapa jauh arah diantara diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Menurut Sjafrijal (2014:38-40) secara umum ada 4 proses dalam pembangunan sekaligus juga menggambarkan tugas pokok badan perencanaan pembangunan, yaitu:

- a. Penyusunan Rencana, yaitu tahapan awal dalam kegiatan pembangunan adalah menyusun naskah atau rencana-rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencanaan pembangunan nasional (BAPPENAS) atau badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA).
- b. Penetapan Rencana, yaitu setelah menyusun rencana pembangunan tahap berikutnya adalah penetapan rencana. Berlaku secara resmi bila telah

mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. Sesuai ketentuan yang berlaku, RPJP perlu mendapatkan pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD cukup medapatkan pengesahan dari kepala daerah. Pada tahapan kedua ini kegiatan utama badan perencanaan adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa penetapan rencana oleh kepala daerah pada umumnya berjalan lancar dila mana BAPEDA telah melakukan finalisasi setelah memasukkan hasil MUSRENBANG. Akan tetapi, penetapan rencana melalui DPRD seringkali memerlukan proses yang cukup memakan waktu karena diperlukan pembahasan kembali oleh pihak dewan. Bahkan adakalanya dewan melakukan kembali pembahasan dengan para tokoh masyarakat untuk mendapkan penilaian terhadap rancangan yang telah disampaikan oleh pihak eksekutif.

- c. Pelaksanaan Rencana, yaitu setelah rencana pembangunan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencanaan masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan. Sasaran utama pengendalian ini adalaah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu. Termasuk dalam kegiatan pengendalian ini adalah melakukan observasi lapangan dan menaggulangi permasalahan dan kendala

yang dihadapi sehingga kegiatan pelaksanaan pembangunan berjalan lancar serta efektif dan efisien.

- d. Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana, yaitu setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan rencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya perlu pula dievaluasi sesuai peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun Tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

## 5. Konsep Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di Negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik, dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuannya (Siagian, 2009;5).

Berdasarkan dari defenisi diatas menurut (Siagian,2009;5) menjelaskan secara cermat, akan meunculnya permukaan paling sedikit tujuh ide pokok :

1. Pembangunan merupakan suatu proses yang berarti pembanguna merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan tanpa akhir.

2. Pembangunan merupakan upaya secara sadar ditetapkan secara berbagai upaya sesuatu untuk dilaksanakan. Karena apabila pembangunan harus ditetapkan secara sadar.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam jangka panjang, menengah/ sedang, dan pendek. Karena merencana berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas, yaitu sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
6. Modernitas yang ingin dicapai sebagai kegiatan pembangunan yang bersifat multidimensional. Artinya modernitas tersebut mencakup seluruh segi bersifat berbangsa dan bernegara.
7. Semua hal yang telah disinggung ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa agar kokoh pondasinya sehingga menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa lain.

Maka dalam hal ini pembangunan merupakan upaya rasional yang artinya menyelenggarakan setiap kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah saja walaupun diakui bahwa peran pemerintah cukup dominan. Jadi para pemerintah dalam memberdayakan kemasyarakatannya harus melibatkan

masyarakat jelata sekalipun, apalagi dalam bidang pembangunan tidak masyarakat yang hanya berperan sebagai penonton saja tetapi semua harus berperan sebagai pemain.

Menurut Riggs, (dalam Ariffuddin,2010;52) mengatakan bahwa Administrasi Pembangunan menunjukkan pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan.

Menurut Montgomery dan Esman, (dalam Ariffuddin, 2010;52) mengemukakan Administrasi Pembangunan meliputi perbaikan aparatur serta pelaksanaan dari pemerintahan (*The Development of administration*) dan juga berarti perbaikan aparatur dan pelaksanaan usaha pembangunan.

Selanjutnya menurut Siagian, (dalam Ariffuddin, 2010;52) Administrasi Pembangunan adalah rangkaian usaha dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa dan Negara untuk mencapai modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

## **6. Konsep Pemerintahan Desa**

Defenisi pemerintah berasal dari bahasa Yunani dari kata “*cratenin*”. Dalam bahasa Inggris, istilah pemerintah disebut dengan, Government, yang berasal dari bahasa Latin yaitu Gubernaculun yang artinya kemudi. Arti Gubernaculun ini di Indonesia diartikan sebagai pemerintah atau pemerintahan.

Menurut Davey pemerintah secara umum memiliki fungsi sebagai penyedia pelayanan, pengaturan, pembangunan, perwakilan dan koordinasi perencanaan (dalam Wasistiono, 2006 ;53).

Menurut Mahfud (2001;66) mengartikan pemerintah sebagai seluruh organ kekuasaan di dalam Negara, yaitu legislative, eksekutif dan yudikatif.

Menurut Widjaja (2003;12) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan menurut Ndraha (2003;6) mengartikan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap anggota masyarakat melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan. Sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Menurut Widjaja (2003;17) Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan tersebut kepada bupati.

Menurut Lolobo (2007:25) menjelaskan tujuan pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya lagi dalam pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk memajukan desa, Kepala Desa mempunyai wewenang :

1. Mempimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat Desa.
6. Membina perekonomian Desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada 26 tersebut, maka Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Memegang teguh dan menalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Malaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotismen.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
9. Melaksanakan dan memepertanggungjawabkan pengelolaan keungan desa.
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nai sosial budaya dan adat istiadat.
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain itu, Kepala Desa juga berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Bupati/Walikota, memberikan Laporan Keterangan Peratnggung Jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Hal tersebut berguna sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dengan dana yang dikeluarkan Kepada Desa dan bagaimana dana desa digunakan atau program apa saja yang dibuat oleh Pemerintahan Desa.

## 7. Konsep Otonomi Daerah

Menurut Sjafrizal (2014:106) Otonomi daerah merupakan hal atau wewenang yang meliputi peraturan pemerintah dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.23 Tahun 2014 tentang Pmerintah Daerah).

Sedangkan asas dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah (syafiie 2002;110) menjelskan :

- a. Asas desentralisasi yaitu, asas yang penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Asas dekonsentrasi yaitu, adalah asas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah, atau kepada instansi vertical tingkat atasnya, kepada pejabat-pejabat di daerah.
- c. Tugas pembantuan yaitu, asas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban memeprtanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Otonomi daerah menyangkut tentang kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*). Berdasarkan hal tersebut maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintah dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (dalam Sjafrijal 2014;106).

Sedangkan desa secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi instansi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.

Menurut Widjaja (2003;4) Desa merupakan instansi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Desa juga akan mendapatlan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Yang berunfgsi untuk pengeluaran daerah terdiri dari 2 (dua) komponen yakni pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan total beban pemerintah daerah yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja non pegawai yang secara terus-menerus dibiayai tiap periode. Pengeluaran pembangunan adalah total beban pemeirntah daerah yang berupa proyek fisik maupun non fisik dalam suatu priode tertentu. Sumber pendapatan desa sebagaimana tersebut diatur dan dikelola dalam anggran dan pendapatan desa (APBD) yang setiap tahunnya

ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD atau pihak yang kemudian dituangkan dalam peraturan desa. Pemerintah kabupaten atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah desa menjadi wilayah pemukiman, industry dan jasa, wajib mengikutsertakan pemerintahan desa dan BPD.

### **8. Program Desa Maju**

Desa adalah sebuah wilayah yang jauh dari pusat keramaian kota, karena hal itu kondisi di desa cenderung masih alami. Jumlah penduduknya pun cenderung sedikit dan di desa masih banyak lahan kosong yang biasanya dimanfaatkan untuk bertani dan berkebun sebagai mata pencaharian utamanya. Menurut perkembangannya, desa dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu :

#### 1) Desa Swasembada atau Desa Maju

Desa jenis ini sudah mampu mengembangkan dan mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya. Ciri-cirinya adalah :

- a) Masyarakat sudah mau mengadakan interaksi dengan masyarakat luar.
- b) Adanya aktivitas tukar menukar barang dengan masyarakat wilayah lain seperti aktivitas dagang.
- c) Adanya kemampuan untuk saling mempengaruhi dengan penduduk di wilayah lain.
- d) Masyarakat sudah mengenal dan memanfaatkan teknologi.

#### 2) Desa Swakarya atau Desa yang sedang Berkembang

Ciri desa swakarya adalah sebagai berikut :

- a) Interaksi dengan masyarakat lain sudah mulai tampak walaupun belum terlalu sering
- b) Masyarakat sudah mampu menjual lebihnya hasil produksi ke daerah lain guna memenuhi kebutuhannya sendiri
- c) Sudah lebih baik dari desa yang terbelakang baik itu dari SDM, Pemanfaatan, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya.

### 3) Desa Swadaya atau Desa Terbelakang

Desa terbelakang ini pada umumnya memiliki ciri sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhan dengan caranya tersendiri, jarang berinteraksi dengan masyarakat luar sehingga proses kemajuannya sangat lambat dan biasanya menolak sebuah perubahan yang ada.

Desa di Indonesia sangat berbeda tingkat kemajuannya dengan desa di luar negeri. Desa di negara-negara maju memiliki lingkungan yang tetap asri tetapi teknologi tepat guna di desa tersebut tidak kalah maju di perkotaan. Hampir setiap warga desanya berpendidikan dan membuat banyak teknologi di desa. Selain itu untuk jangkauan listrik di desa tersebut dibangunlah pembangkit listrik yang ramah lingkungan agar tidak mencemari desa tetapi warga desa tetap bisa merasakan kemajuan teknologi terkini. Pembangkit listrik itu diantaranya bertenaga surya, angin, air, mikrohidro. Warga desa disana menjadikan teknologi sebagai penopang kelestarian alam.

Sedangkan untuk desa di Indonesia akses jalan ke desa sudah sangat sulit. Listrik disana juga sangat sulit sehingga masyarakatnya buta akan teknologi kekinian, hal itu juga yang menyebabkan orang enggan mengikuti program transmigrasi yang telah disediakan oleh pemerintah pusat. Selain itu juga perekonomian disana masih kurang maju.

Ada beberapa desa yang terus mengalami perkembangan, namun desa yang berkembang tersebut sudah hampir tidak bisa disebut desa lagi. Pembangunan industri dimana-mana, perumahan-perumahan elit dibangun diatas lahan yang

seharusnya menjadi tempat bagi kelestarian alam. Teknologi yang seharusnya dipakai dan cocok di daerah perkotaan mulai diterapkan di desa. Akibatnya terjadilah banyak masalah lingkungan di desa tersebut, penduduk lokal mulai tersisihkan dan semakin miskin karena sawahnya telah dijadikan perumahan elit.

Banjir yang juga terjadi atau bahkan tanah longsor disebabkan kerusakan lingkungan yang ada di sana. Desa yang seharusnya menjadi paru-paru dalam suatu wilayah berubah menjadi kawasan perkotaan yang tidak berkonsep. Memang pembangkit listrik mulai dibangun di beberapa desa terpencil, tetapi masih saja terjadi pemadaman.

Selain itu penduduk yang awalnya tidak mengenal sampah plastik mulai mengenal sampah plastik. Akibatnya penduduk desa banyak membuang sampah tersebut di sembarang tempat. Dengan pikiran bahwa sampah tersebut akan membusuk seperti sampah yang lainnya. Terjadilah penumpukan sampah di desa dan pinggiran sungai dekat desa yang pada akhirnya mencemari lingkungan perairan di sana. Akibat dari banyaknya pencemaran yang ada, kualitas pertanian dari suatu desa menurun dan kuantitasnya semakin sedikit. Itulah gambaran secara umum sekaligus membandingkan kondisi desa di Indonesia dengan yang ada di negara-negara maju.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meminta kepada seluruh kepala desa yang ada di berbagai penjuru Nusantara untuk terus berinovasi mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Upaya itu dapat dilakukan pihak desa dengan meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selama ini BUMDes yang dikelola ribuan desa di Indonesia belum mengalami perkembangan yang signifikan. Untuk itu

pihak Kemendes PDTT akan terus melakukan pantauan agar BUMDes tersebut ‘naik kelas’, dengan begitu potensi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Maju kian cemerlang.

Sejak digulirkannya dana desa oleh pemerintah pada 2014 lalu, sudah ada 4.712 BUMDes yang dikelola oleh masing-masing desa. Jika dipersentasikan dengan jumlah desa yang mencapai 74 ribu, maka jumlah desa yang telah memiliki BUMDes sebesar 60 persen. Ada BUMDes pemula, BUMDes berkembang dan BUMDes maju. Tugas kita mendorong percepatan supaya BUMDes itu naik kelas, sehingga desa kita maju dan mandiri. Indeks desa membangun yang dirumuskan pemerintah pusat terdiri dari dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi ekologi. Tiga dimensi tersebut dibuat untuk mendorong 10 ribu desa tertinggal mengalami perubahan. Selain itu, indikator tiga dimensi juga untuk mewujudkan 500 desa berkembang beralih status menjadi desa yang maju dan mandiri.

Dimensi sosial yaitu mengukur akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, terhadap pelayanan air bersih, terhadap pendidikan yang bisa diakses dengan cepat, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Sedangkan dimensi ekonomi yakni masyarakat desa yang memiliki kemudahan untuk mengakses permodalan dan usaha-usaha kecil di masyarakat oleh desa. Dan dimensi ekologi adalah sikap masyarakat untuk mewujudkan desa mereka yang aman bencana alam dan sebagainya.

Pada dasarnya baik masyarakat kota maupun desa saling membutuhkan. Tanpa masyarakat desa, orang-orang yang berada di kota tidak akan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Dan sebaliknya, hasil yang mereka tanam akan dijual pada masyarakat kota guna memenuhi kebutuhan mereka di desa.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman lonjakan urbanisasi yaitu perpindahan penduduk desa kota ini semakin banyak. sehingga tidak terjadi keseimbangan antar kota maupun daerah. Akibatnya, desa pun semakin tertinggal karena tidak ada yang mau untuk berinovasi atau membangun desanya sendiri terutama dikalangan anak muda. Penyebabnya bermacam-macam, namun yang pasti biasanya didasari oleh fasilitas desa yang tidak serba mudah seperti yang ada di kota. Tentunya bila terus dibiarkan tidak adakan bagus untuk perkembangan disesa maupun kota di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, saling membantu antara masyarakat kota dan desa sangat diperlukan. Untuk mewujudkannya bisa dimulai dari membuat program inovasi desa yang tentunya baik untuk mereka. Pemerintah Indonesia sudah memiliki Kementerian khusus yang mengurus desa-desa di Indonesia yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Adapun program-program inovasi desa maju diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Inovasi Air Sungai sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Seperti yang diketahui bersama, suasana di malam hari ketika berada di desa itu tidak sebaik dengan kota. Bila malam tiba, desa seolah menjadi daerah “mati” karena gelap, jalan jelek, dan aktivitas di malam hari pun terbatas. Padahal bila disinergikan dengan alam yang ada di sekitar, di desa pun bisa mendapatkan fasilitas penerangan yang baik seperti di kota. Tentunya untuk bisa mendorong mereka melakukan inovasi, harus dibantu dan didampingi oleh seseroang yang memiliki ilmu ersebut dan ditularkan kepada masyarakat desanya. Contohnya saja, warga desa yang

ada di Batang Uru, Mamasa, Sulawesi Barat membuat sebuah inovasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Dengan membuat program inovasi desa tersebut, kini masyarakat desa di sana bisa menikmati listrik pada malam hari. Karena inovasinya tersebut, kini desa mereka menjadi penyedia turbin yang dipesan oleh daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur hingga wilayah Sulawesi.

2) Program Inovasi Teknologi Sumur sebagai Ketersediaan Air Desa.

Pada tahun 2007 silam, Indonesia pernah dilanda kemarau yang cukup lama hingga mencapai lima bulan. Otomatis dengan kemarau ini, ada di beberapa wilayah Indonesia yang terjadi kekeringan sehingga mereka sulit mendapatkan air bersih. Selain kekeringan di wilayah kota, wilayah desa pun dilanda kekeringan sehingga terciptalah sebuah program inovasi Teknologi Sumur yang pertama kali dicetuskan oleh Desa Sugih Waras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Program tersebut dibuat dengan bantuan dari tenaga profesional yang mendampingi Himpunan Penduduk Pemakai Air Pam (HIPPAM) untuk membuat teknologi sumur yang diperlukan oleh mereka. Bersama dengan tenaga ahli tersebut, mereka membuay sumur submersible yang memiliki kedalaman 60 meter dan menambah kembali 2 sumur untuk menampung air lainnya. Dengan kerjasama tersebut, pada akhirnya warga Sugih Waras pun bisa mendapatkan air bersi dan bisa didistribusikan ke rumahnya masing-masing. Dengan inovasi tersebut, bisa didistribusikan ke desa lain hingga mencapai 972 pelanggan.

3) Program Inovasi Desa Konservasi Bambu untuk Menjaga Sumber Mata Air dan Debit Air Embung Pertanian.

Seperti yang diketahui bersama, mata pencaharian penduduk desa adalah bertani. Seiring dengan berkembangnya zaman dalam hal pertanian pun mengalami kemajuan seperti dari pupuk, pembibitan, dan terutama dalam hal menjaga kestabilan debit air untuk mengairi lahan pertanian. Di desa Sanankerto, Kabupaten Malang, Jawa Timur memiliki sebuah program inovasi konservasi Bambu agar bisa menjaga debit air embung tetap stabil.

Inovasi tersebut mereka dapatkan dari tenaga ahli yang membantu dan membimbing mereka untuk bisa membuat petani tidak perlu khawatir kekurangan air untuk lahan pertaniannya. Kini desa tersebut juga menjadi salah satu tujuan wisata, yang kemudian memunculkan kembali mata pencaharian lain yang bermanfaat untuk desa dan juga keluarga mereka.

#### 4) Program Inovasi Desa Penyusunan Ulang Informasi Kepemilikan Tanah Warga.

Inovasi penyusunan ulang kepemilikan tanah ini tercipta manakala banyak penduduk setempat yang memiliki sertifikat tanah dengan kondisi yang sudah rusak dan juga buram. Wajar hal tersebut terjadi karena semenjak tahun 1940 belum ada lagi perbaikan atau pergantian sertifikat tersebut. Karena itulah, untuk menghindari konflik tentang kepemilikan tanah yang dirasa sangat sensitif, maka para tenaga profesional pun mengedukasi warga desa tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah tersebut. Inovasi tersebut sudah dilaksanakan oleh Desa Jambearjo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mereka sudah memiliki akte tanah yang abru sehingga tanah yang mereka miliki tidak akan menjadi sengketa di kemudian hari. Hal ini juga akan

diberikan pada desa lain yang ada di Indonesia. Mengingat, perihal tanah ini menjadi sesuatu yang sensitif dan bisa menimbulkan perpecahan yang tidak diinginkan.

5) Program Inovasi Desa Mengaktifkan Kembali BUMDes yang Dibekukan.

BUMDes dibekukan ini terjadi di wilayah Desa Ganeas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pada mulanya BUMDes tersebut didirikan pada tahun 2008. Tetapi, terpaksa harus dibekukan pada tahun 2013 karena manajemen yang tidak mengelola BUMDes dengan baik. Adanya BUMDes ini sebenarnya sangat membantu warga sekitar sehingga perekonomian mereka pun terbantuan. Akhirnya pemerintah setempat pun berusaha untuk membangkitkan kembali dimulai dari melakukan perbaikan dari pengurusan, dan tata kelola badan usaha. Walhasil, dengan dukungan dan kerja sama yang baik dengan warga, kini BUMDes pun telah berkembang dari segi anggota, program, dan juga omset yang didapatkan oleh BUMDes sendiri.

6) Program Inovasi Desa Mengubah Limbah Minyak Goreng Menjadi PAD.

Sangat disayangkan bila desa yang memiliki keindahan alami dan asri harus ternodai dengan limbah-limbah yang ada, terutama minyak goreng yang notabenehnya sering digunakan banyak orang. Oleh karena itulah, pihak BUMDes bekerja sama dengan PT. Tirta Investama mengolah limbah minyak goreng tersebut menjadi produk campuran bahan bakar.

Hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Panggunharjo, Yogyakarta dimana pada mulanya banyak warga yang membuang minyak goreng ke sungai sekitar

desar. Karena hal itulah, desa mereka tercemari serta menumbuhkan program inovasi untuk mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Siapa sangka dari langkah tersebut, pihak BUMDes beserta masyarakat sekitar bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar guna untuk mensejahterakan warganya.

7) Program Inovasi Desa Pemanfaatan Tenaga Ahli untuk Pengembangan Usaha Desa

Kekayaan alam yang ada di desa sangat sayang bila tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Karena selain bertani, mereka pun memiliki peluang untuk mengembangkan kekayaan alam sehingga bisa dijadikan lahan bisnis yang baik. Ketika niat dan keinginan sudah mereka miliki, sayangnya kemampuan untuk berbisnis masih sangat kurang maka diperlukan tenaga ahli dalam bisnis untuk mengembangkan usaha mereka.

Berawal dari sanalah pemerintah Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ingin membuat sebuah langkah baru untuk mengembangkan usaha di desa. Dengan memanggil dan bekerja sama dengan tenaga ahli dalam bisnis, diharapkan mampu membimbing para pebisnis di desa untuk bisa mengembangkan usahanya. Di desa tersebut, ada yang mengelola ikan air tawar, budidaya jamur tiram, serta usaha lainnya yang lebih produktif. Dari kerjasama dan bimbingan itulah, desa tersebut mampu menjadi desa dengan menghasilkan para wirausaha baru dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya.

#### 8) Program Inovasi Desa Membangun Sekolah untuk Memenuhi Kebutuhan Pendidikan

Seperti yang diketahui bersama, pembangunan di desa belum sepenuhnya terpenuhi terutama dalam hal pendidikan. Tak jarang, para anak-anak desa harus bersekolah dengan puluhan kilometer jaraknya ataupun kondisi sekolah yang tidak layak untuk dihuni. Padahal, pemerintah pusat maupun daerah sepakat untuk mewajibkan pendidikan minimal 12 tahun. Seperti yang dialami oleh Pemerintah Desa Blang Krueng, Aceh, desa mereka masih tertinggal terutama dalam hal pendidikan. Maka pemerintah setempat berinisiatif untuk membangun taman kanak-kanak (TK) dan juga sekolah dasar (SD) guna memenuhi kebutuhan warganya untuk mengenyam pendidikan awal dan dasar.

Sebelum kejadian Tsunami, bangunan pendidikan di desa tersebut sudah cukup terpenuhi. Sayangnya desa tersebut menjadi desa yang terkena dampak tsunami. Maka, dari sanalah pemerintah setempat membangun kembali dari nol sehingga kebutuhan pendidikan warga terpenuhi dengan baik.

#### 9) Program Inovasi Desa Membuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Selain pembangunan pendidikan formal, ada pula desa yang membuat lembaga pendidikan non formal bernama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Lembaga PKBM tersebut sudah ada di Desa Lauwonu, Gorontalo sejak tahun 2006. Tenaga pengajar yang dimiliki PKBM pun berasal dari guru SMK dan adapula yang masih kuliah di perguruan tinggi. Mereka membuat sistem pembelajaran lebih menyentuh pada keahlian yang mereka miliki. sehingga para

alumni PKBM adalah orang-orang yang siap untuk kerja ataupun bisa membuka usaha sendiri. Dengan begitu, angka pengangguran di wilayah tersebut bisa menurun.

#### 10) Program Inovasi Desa BPJS Desa Mandiri

BPJS saat ini menjadi “kartu sakti” yang bisa meringankan biaya pengobatan warga Indonesia. Namun, sayangnya tidak semua warga memiliki kartu tersebut selain kendala teknis ada pula yang memang tidak ingin mengurusnya. Karena itu, Pemerintah desa Kuripan Selatan, Kuripan, Lombok Barat, berinisiatif untuk merintis sebuah kebijakan untuk bisa membantu biaya perawatan. Hal ini mereka lakukan dengan membuat BPJS Desa mandiri yang dikelola oleh Organisasi Kesehatan Masyarakat (OKM) desa. Dengan adanya BPJS mandiri ini, diharapkan warga dapat gotong royong dalam hal kesehatan. Karena bila mengandalkan BPJS yang dikelola pemerintah, banyak warga yang tidak sanggup membayar iuran rutinnya.

### 9. Konsep Pembangunan dan Pembangunan Desa

Menurut Siagian (2001:4), mendefinisikan pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju kemampuan dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Dari definisi tersebut dapat ditarik simpulan mengenai pembangunan sebagai berikut :

- a. Pembangunan merupakan suatu proses yang bermakna rangkaian kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bertahap yang bersifat independen dan tanpa akhir. Hal ini dapat ditentukan berdasarkan jangka waktu, biaya, dan hasil yang diperoleh.

- b. Pembangunan merupakan upaya secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana bermakna, bahwa dalam perencanaan ada pengembalian keputusan mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa depan.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan. Ini berarti peningkatan kemampuan untuk berkembang dan harus bersikap proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda.
- e. Pembangunan mengarah pada modernitas bermakna bahwa cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan yang sifatnya multidimensional yaitu mencakup seluruh segi kehidupan.

Lebih lanjut lagi ia mengatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas mencakup sebagai berikut :

1. Pembangunan dibidang politik
2. Pembangunan dibidang ekonomi
3. Pembangunan dibidang sosial, dan
4. Pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan.

Pembangunan yang meliputi segala aspek segi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya baru akan berhasil apabila kegiatan melibatkan masyarakat di dalamnya baik pada proses pengambilan kebijakan maupun pelaksanaannya. Ada tiga aspek penting dalam rangka partisipasi pembangunan, yaitu :

1. Terlibat dan ikut sertanya masyarakat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam sebuah Negara untuk turut menentukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan, arah serta strategis dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
3. Adanya perumusan-perumusan dan pelaksanaan program-program partisipasi dalam pembangunan berencana.

Menurut Corelie (dalam Ndraha 2010;15) mengartikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya.

Seterusnya ia mengatakan bahwa implikasi dari referensi tersebut yaitu:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan dan pemerataan nilai kesejahteraan (*equity*).
3. Menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti mengakibatkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara yang lainnya dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).

Dari beberapa pengertian tentang konsep pembangunan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu kerangkaan usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana dan sadar menuju kondisi yang lebih baik oleh pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan desa di arahkan pada pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dkehendaki menuju keadaan yang lebih baik. Roup (dalam Ndraha 1990;101).

Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta membesar kesejahteraan desa.

Dipertegas oleh Siagian (2008;108) Pembangunan Desa adalah Keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa.

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia, oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan baik oleh pihak lain dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri menurut Siagian (2008;108) yaitu :

1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat.
3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.
4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah perdesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
5. Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi yang tepat waktu. Jadi didalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, dimana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu

diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002;20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

#### **10. Konsep Perencanaan Pembangunan Desa**

Menurut Arsyad (dalam Sjafrizal, 2014;30-38) menjelaskan tentang jenis perencanaan pembangunan, diantaranya yaitu :

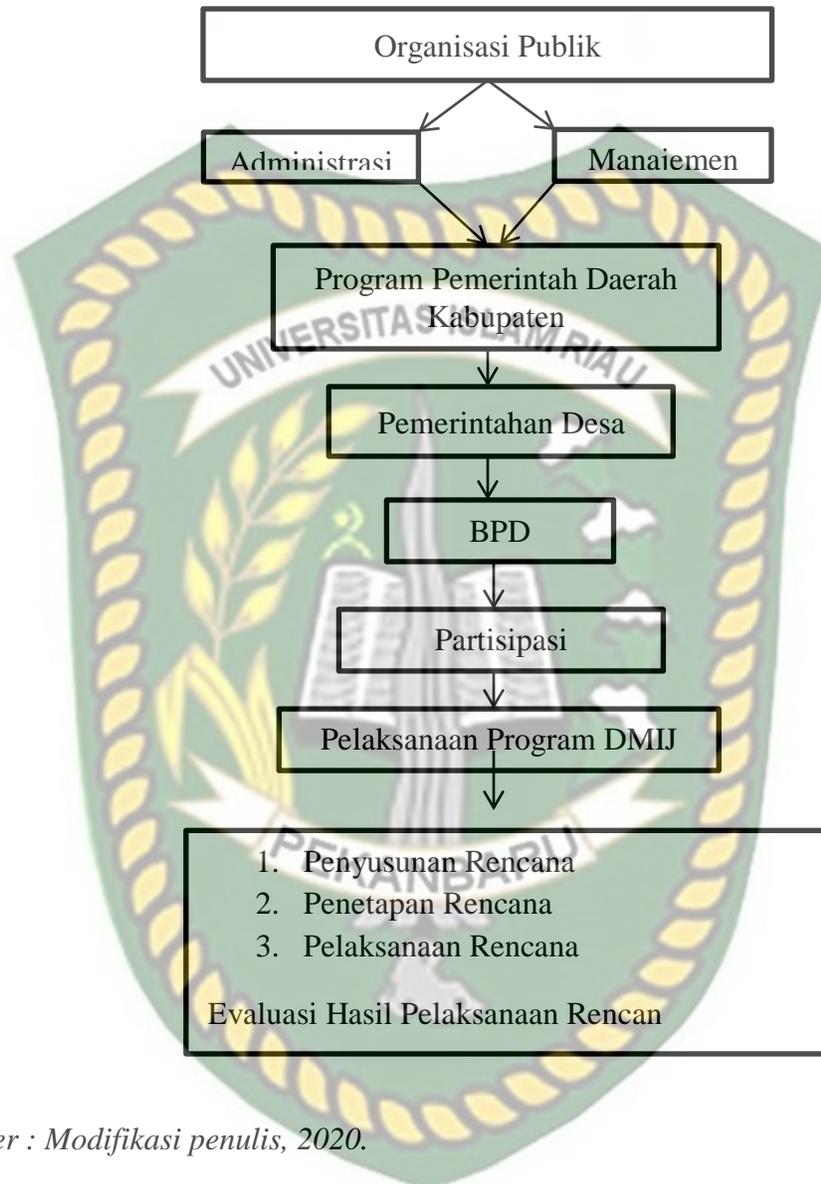
1. Perencanaan jangka panjang, yaitu perencanaan jangka panjang biasanya disebut juga sebagai perencanaan perspektif yang berisikan arah pembangunan secara umum. Perencanaan jangka panjang berisi pandangan sesuai dengan aspirasi masyarakat secara umum. Karena itu perencanaan jangka panjang bersifat lebih makro/menyeluruh dan tidak sampai kepada program dan kegiatan secara rinci. Sedangkan aspek yang dibahas meliputi bidang ekonomi, sosial-budaya, dan tata ruang. Juga dalam perencanaan jangka panjang mencakup penetapan pembangunan untuk periode lima tahun. Hal ini perlu dilakukan agar perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun.
2. Perencanaan jangka menengah, yaitu perencanaan jangka menengah (Medium-term Planning) biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Perencanaan jangka

menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat operasional. Perencanaan jangka panjang berisikan perumusan kerangka ekonomi makro, startegi, kebijakan dan program pembangunan yang disusun berdasarkan visi dan misi presiden atau kepala daerah terpilih. Disamping itu, perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

3. Perencanaan jangka pendek yaitu perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun, sehingga sering kali juga dinamakan sebagai rencana tahunan (Annual Planning). Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari Rencana Jangka Menengah. Disamping itu, perencanaan tahunan bersifat sangat operaasional kerna didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaanya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Oleh karena itu, rencana Anggaran ini selanjutnya dijadikan dasar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada tingkat nasional (RAPBN) maupun tingkat daerah (RAPBD).

## B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 :Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Modifikasi penulis, 2020.

## C. Konsep Operasional

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami konsep mempunyai tingkat generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat

konsep itu diukur. Untuk memudahkan penyelesaian dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis perlu membatasi dan mengoprasionalkan yang dipakai konsep-konsep tersebut antara lain :

- a. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan selanjutnya.
- b. Organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi bagi tugas-tugasnya diantara para anggota merupakan hubungan-hubungan kerja dan menyetujui aktifitasnya kearah pencapaian tujuan Negara.
- c. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengevaluasi pekerjaan anggota organisasi dan mengarahkan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah di tetapkan.
- d. Pemerintah desa adalah Kepala Desa Bangun Harjo Jaya beserta staf atau perangkat Desa, Badan permusyawaratan Desa Bangun Harjo jaya dan setiap individu yang terkait dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya.
- e. Pembangunan sarana infrastruktur pada desa adalah semua sarana yang dibangun atas tujuan menunjang mobilitas masyarakat Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung.
- f. Proses pembangunan yang dimaksudkan dalam penelitian ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana adalah segenap usaha yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya dalam menyusun rencana pembangunan, pertimbangan dari aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembangunan dan hal yang terkait dengan rencana pembangunan.
2. Penetapan rencana adalah hak kewenangan pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya dalam menetapkan rencana pembangunan yang telah disaring oleh pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya.
3. Pelaksanaan rencana adalah hal yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Bangun Harjo Jaya saat pembangunan sedang berlangsung. Dilakukan untuk mengontrol agar pembangunan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
4. Evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana adalah hal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya setelah pembangunan selesai lakukan perbandingan antara rencana dengan hasil.

#### **D. Oprasionalisasi Variabel**

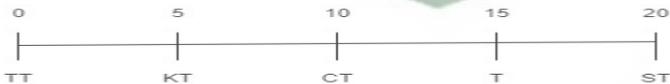
Untuk mempermudah arah dalam penelitian tentang Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis membuat konsep operasional variabel yang terdiri dari 4 indikator variabel. Dalam variabel terdapat masing-masing indikator yang merupakan pelaksanaan pembangunan yang dikemukakan oleh Sjafrijal. Indikator yang dimaksud adalah penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana, dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Secara keseluruhan indikator yang dikemukakan tersebut adalah pelaksanaan

dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang pada kesempatan ini penulis melakukan penelitian di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

Tabel II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Menurut Sjafrijal (2014:38) Pelaksanaan program merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan yang mencakup periode jangka panjang, menengah dan tahunan, dan menyangkut variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.	Pelaksanaan Program	<p>a. Penyusunan rencana</p> <p>b. Penetapan rencana</p> <p>c. Pelaksanaan rencana</p> <p>d. Evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana</p>	<p>1. Mendengarkan aspirasi masyarakat</p> <p>2. Menghadiri rapat</p> <p>3. Memberikan ide/pendapat</p> <p>4. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan</p> <p>1. Menghadiri rapat penetapan rencana pembangunan</p> <p>2. Memberikan saran dan ide pemikiran</p> <p>3. Terlibat dalam pengambilan keputusan penetapan rencana pembangunan</p> <p>1. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan</p> <p>2. Melakukan pengawasan dalam pembangunan</p> <p>3. Pengarahan dalam melakukan pembangunan</p> <p>4. Berperan aktif dalam melakukan pembangunan yang dilaksanakan.</p> <p>1. Meninjau hasil dengan rencana pembangunan</p> <p>2. Membukukan arsip pembangunan</p> <p>3. Melakukan pembahasan terhadap pembangunan yang telah terlaksana.</p> <p>4. Mengidentifikasi kelemahan dalam proses pembangunan.</p>
<p>a. Penyusunan rencana</p>  <p>b. Penetapan rencana</p> 			

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
c. Pelaksanaan rencana			
d. Evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana			

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

### E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian menurut Sygiono (1999) dalam ( Wiratna Sujarweni 44,2014 ) pengukuran dalam pengukuran kuantitatif dimaksud untuk menentukan data apa yang ingin diperoleh dari variabel penelitian yang ditentukan. Pengukuran berarti bagaimana peneliti mengukur variabel berupa data. Penelitian ini menggunakan skala likert digunakan untuk menyusun sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial ( Sugiono,107:2014 ).

Statistik deskriptif bukan menggunakan pengolahan data statistik murni, namun disesuaikan dengan skala likert berbentuk interval. Data interval dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skorsing setiap jawaban dari responden ( Sugiono, 109:2014). Teknik analisis data yang digunakan menggunakan rata-rata dan persentasi dari tabel, angka rata-rata suatu skor yang ditunjukkan dengan jarak antara skor yang di peroleh dengan skor rata-rata.

$$X = (x - \bar{x})$$

$\sum x$  = total kusioner

$$\bar{x} = \frac{\text{total}}{\text{sampel}}$$

*median* = hasil dari total dan sampel

$N$  = Sampel

(Suprpto, 2013:125).



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif ( Descriptive researech ). Penelitian deskriptif merupakan penelitian otakus, sikap, spendapat kelompok individu, perangkat kondisi dan prosedur, suatu sistem pemikiran atau peristiwa dalam rangka membuat deskripsi atau gambaran secara sistematik dan analitik yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah ahli pada masa kini. ( Suprpto,13:2013). Sedangkan klasifikasi penelitian deskriptif menggunakan penelitian survei. Penelitian ini memberikan gebrakan secara empiris tentang fakta-fakta pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) berdasarkan penodesasi.

Secara langsung pengambilan informasi penelitian meliputi masyarakat yang cukup besar untuk Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kab. Indragiri Hilir. Maka oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dan kuantifikasi (penyuluhan) ( Wiratna Sujeri, 39:2014 ).

##### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dan sekitar 20 Km jarak ke pusat pemerintahan Kecamatan. Desa Bangun Harjo Jaya banyak melakukan pembangunan infrastruktur sejak awal tahun 2000an. Disamping itu Program Desa Maju Inhil Jaya di Desa Bangun Harjo Jaya belum terlaksana dengan baik.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012:73), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Aparat Pemerintah Desa, BPD, Tim Pelaksana Program, dan Tokoh Masyarakat Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.

### 2. Sampel

Secara umum generalisasi objek penelitian untuk pemerintah desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kab. Indragiri Hilir berjumlah 44 orang. Menurut Sugiono (2012:73), sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya maka peneliti dapat menggunakan sebagian sampel yang diambil dari populasi. Oleh karena itu, sampel penelitian berjumlah 44 orang yaitu teknik penarikan sampel sensus. Teknik sensus yaitu penarikan sampel secara keseluruhan dari populasi yang ada ( Sugiono 2012:76 ).

## D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Sensus yaitu penarikan sampel secara keseluruhan dari populasi yang ada (Sugiyono,

2012:76). Karena seluruh responden tersebut dianggap mengetahui permasalahan penelitian yaitu mengenai Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Untuk melakukan penelitian ini maka perlu diketahui sumber data dalam memperoleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

##### **a. Sumber data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui kuisioner dan hasil wawancara yang telah diberikan untuk memperoleh informasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian pengamatan langsung pada lokasi penelitian.

##### **b. Sumber data sekunder**

Data sekunder sebagai data yang memperkuat penelitian ini yang diperoleh dari interaksi review, laporan data pemerintah dan laporan publikasi diluar pemerintah.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian ( Wiratna Sujarweni, 74:2014 ).

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner

Seperangkat pertanyaan kepada responden dengan maksud agar memperoleh jawaban.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, melakukan dialog atau percakapan kepada responden berdasarkan tujuan penyelidikan untuk memperoleh data secara langsung dari responden terkait dengan penelitian ini.

3. Observasi

Pencatatan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui hasil pengamatan secara sistematis dimasukkan dalam penelitian dalam melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

4. Analisis Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun data yang berbentuk dokumen bukti konkrit yang berisikan data penting, guna memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.

### G. Teknis Analisis Data

Analisis data dilakukan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Wiratna Sujarweni, 103:2014)

### H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (Dmij) Bidang Sarana Infrastruktur Di Desa Bangun Harjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir seperti tertera pada rincian penggunaan waktu perkegiatan di table berikut ini:



**Tabel III.2: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisioner																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konfhensif																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

### I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian ini dipaparkan dalam bentuk skripsi yang dibahas dalam 6 BAB, diantaranya yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

#### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

Pada bab ini berisi studi kepustakaan, kerangka pikir, hipotesis, konsep operasional, dan operasional variabel.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal waktu kegiatan penelitian.

**BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini terdiri atas identitas responden. Pada bab pembahasan akan dibahas tentang hasil penelitian.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

## BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukota Tembilahan adalah sebuah daerah dengan perkebunan kelapa terluas di Indonesia bahkan di dunia yang terletak di bagian selatan Provinsi Riau, Daerah ini terkenal dengan julukan “Negeri Seribu Parit” karena daerah ini terdiri dari perairan, sungai, rawa-rawa dan perkebunan kelapa yang dipisahkan oleh ribuan parit.

#### 1. Keadaan Geografis

Tembilahan terletak di pantai timur pulau Sumatera, itu di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan gerbang selatan Provinsi Riau, dengan luas wilayah 18.812,97 km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 km<sup>2</sup> dan luas perairan laut 6.318 km<sup>2</sup> dan luas perairan umum 888,97 km<sup>2</sup> serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km<sup>2</sup> berpenduduk kurang lebih 703.734 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis. Kabupaten Indragiri Hilir yang dijuluki “Negeri Seribu Parit” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa, laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah daratan rendah yang terletak di ketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan di pengaruhi oleh pasang dan surut.

Secara geografis daerah ini berada pada 0<sup>o</sup>36' LU, 1<sup>o</sup>07' LS dan antara 102<sup>o</sup>32' dan 104<sup>o</sup>10' BT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut, daerah hutan puyau (*mangrove*) dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6-35 meter diatas permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi pasang surut, apabila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah oleh beberapa sungai dan terusan, sehingga membentuk gugusan-gugusan pulau. Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Tembilahan Kota
2. Kecamatan Tembilahan Hulu
3. Kecamatan Tempuling
4. Kecamatan Pulau Burung
5. Kecamatan Teluk Belengkong
6. Kecamatan Kateman
7. Kecamatan Mandah
8. Kecamatan Pelangiran
9. Kecamatan Gaung
10. Kecamatan Gaung Anak Serka
11. Kecamatan Batang Tuaka
12. Kecamatan Kuala Indragiri
13. Kecamatan Enok
14. Kecamatan Tanah Merah
15. Kecamatan Kemuning
16. Kecamatan Reteh
17. Kecamatan Concong
18. Kecamatan Sungai Batang
19. Kecamatan Kempas
20. Kecamatan Keritang

## 2. Demografi

Pertumbuhan penduduk kabupaten Indragiri Hilir mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada tahun 1993 jumlah penduduknya berjumlah 50.525 jiwa, sementara pada tahun 1997 menjadi 569.591 jiwa atau bertambah sebesar 2,70%. Pada saat ini jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 703.734 jiwa yang terdiri dari sejumlah suku/etnis seperti Banjar dari Kalimantan, Bugis dari Sulawesi, dan Melayu dari Jambi.

## 3. Fisiografi

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (Pet), daerah hutan puyau (*mangrove*) dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.802.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69%, berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Dengan lingkungan tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau. Sungai yang terbesar didaerah ini adalah sungai Indragiri Hilir, sungai Indragiri mempunyai tiga muara ke Selat Berhala, yaitu: di Desa Sungai Bela, Desa Perigi Raja dan Kuala Enok. Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah: Sungai Guntung, Sungai Kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai

Anak Serka, Sungai Batang Tuaka, Sungai Enok, Sungai Gangsal, yang hulunya bercabang tiga yaitu Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reteh, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai Bantaian, dan Sungai Batang Tamu.

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada Umumnya telah didiami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya. Gugusan pulau tersebut meliputi: Pulau Keteman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur, dan pulau-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut masih terdapat pulau selat-selat/ terusan kecil lainnya seperti: Selat/terusan Kempas, Selat/terusan Tekulai. Selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni Danau Gaung, Danau Danai, dan Danau Kateman, sedangkan tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Bakung.

#### **4. Sosial Budaya**

Kondisi budaya di Kabupaten Indragiri Hilir kental dengan budaya Melayu. Terdapat dua budaya yang mempengaruhi penggunaan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu Melayu Riau dan Melayu. Masyarakat Melayu secara tradisional telah memiliki beberapa prinsip fisiologis yang mengatur konsepsi hidup dan kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Melayu telah memasukkan alam sebagai bagian dari kehidupan mereka secara integral. Mereka belajar dari alam untuk kemudian menjadikannya sebagai inspirasi bagi prinsip hidup dan kehidupannya.

## B. Gambaran Umum Kecamatan Pulau Burung

Pulau Burung merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang memiliki luas 531,22 km<sup>2</sup> atau sekitar 53.122 ha yang terdiri dari 15 desa/kelurahan. Jarak tempuh dari ibukota kabupaten adalah 117 km dan dari ibukota propinsi adalah 192 km. Akses menuju Pulau Burung dapat ditempuh melalui transportasi air dengan menggunakan kapal-kapal kecil maupun speed boat. Jarak tempuh melalui ibukota kabupaten yaitu Tembilahan, dapat ditempuh perjalanan menuju Pulau Burung sekitar 4 jam perjalanan, selain melalui Kota Tembilahan akses menuju Pulau Burung juga dapat ditempuh melalui Pulau Batam sekitar 3 jam perjalanan.

Adapun batas-batas geografis Kecamatan Pulau Burung antara lain adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kateman
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Blengkong dan Kecamatan Mandah.

Pulau Burung merupakan sebuah wilayah yang masih menyatu dengan daratan Sumatera. Berada di pesisir pantai timur Sumatera dikelilingi oleh sungai-sungai dan rawa-rawa. Topografi berupa lahan gambut dan berada di wilayah iklim tropis basah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi yaitu 2.000 mm per tahun. Berada pada ketinggian antara 1 hingga 4 meter di atas permukaan air

laut. Wilayah Pulau Burung terdiri dari sungai-sungai kecil, parit-parit, dan sungai galian ataupun kanal. Di tepi sungai dan muara parit-parit tersebut banyak ditemukan vegetasi seperti pohon nipah dan pohon bakau. Akses transportasi ke wilayah ini secara umum menggunakan akses transportasi perairan. Penduduk Kecamatan Pulau Burung lebih mengandalkan transportasi air untuk bepergian ke wilayah sekitar daripada transportasi darat. Hal ini dikarenakan tekstur tanah gambut yang sulit untuk membangun jalan darat. Dengan kata lain, jalur transportasi darat seperti jalan raya yang beraspal yang menghubungkan ke Pulau Burung sendiri belum tersedia.

Kecamatan Pulau Burung terdiri atas 15 desa/kelurahan, yang seluruhnya sudah definitif antara lain; Desa Pulau Burung, Bangun Harjo, Ringin Jaya, Mayang Sari Jaya, Bukit Sari Intan Jaya, Manunggal Jaya, Teluk Nibung, Sungai Danai, Sri Danai, Sapta Jaya, Kramat Jaya, Suka Jaya, Sempadan Jaya, Bangun Jaya, dan Suko Harjo Jaya. Setiap desa yang berada di Kecamatan Pulau Burung dipimpin oleh seorang kepala desa/lurah yang dalam menjalankan tugasnya kepala desa/ lurah dibantu oleh beberapa aparatnya. Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna, pemerintah telah mengadakan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan kecamatan. Kecamatan Pulau Burung pada awalnya merupakan sebuah desa yang bernama Desa Pulau Burung yang sampai tahun 2000 masih menjadi bagian dari Kecamatan Kateman.

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan kehidupan masyarakat yang semakin membaik, semakin meningkatnya jumlah penduduk yang

bermukim di Desa Pulau Burung, dan kegiatan pemerintahan serta pembangunan pada wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, dipertimbangkan guna memperlancar tugas-tugas pemerintahan dan rencana pembangunan daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk sebuah kecamatan baru, pada tanggal 26 Mei 2001 Desa Pulau Burung resmi dibentuk menjadi sebuah kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pulau Burung. Di Kecamatan Pulau Burung telah dilaksanakan pembentukan dan penataan kembali susunan organisasi pemerintahan Kecamatan Pulau Burung berdasarkan struktur organisasi pola minimal sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 218 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997 yang membahas tentang Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.

Adapun dasar pembentukan Kecamatan Pulau Burung berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2000 memutuskan bahwa Kecamatan Pulau Burung diresmikan pada tanggal 26 Mei 2001 sebagai bagian dari pemekaran Kecamatan Kateman termasuk di dalamnya Kecamatan Pelangiran dan Kecamatan Teluk Belengkong. Seperti halnya dengan pembentukan Desa Pulau Burung yang tidak jauh berbeda dengan pembentukan desa pada umumnya, yang secara sederhana ingin menetap dan tinggal bersama dengan keluarga sebagai cara untuk mempertahankan serta meningkatkan taraf kehidupan kelompok tersebut.

Pulau Burung awalnya hanya dihuni oleh beberapa kelompok masyarakat saja yang mayoritas merupakan suku Melayu yang bermata pencaharian sebagai

petani dan nelayan. Kehidupan masyarakat di Pulau Burung sampai tahun 1985 sebelum dibukanya perkebunan kelapa hibrida masih bersifat sangat sederhana dan tradisional. Masyarakat di Pulau Burung sampai tahun 1985 mayoritas penduduk masih mengonsumsi olahan sagu yang diperoleh dari pohon-pohon sagu yang tumbuh di tepi rawa-rawa maupun sungai-sungai terdekat. Menurut mereka olahan sagu tersebut lebih mengenyangkan daripada nasi yang dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Kehidupan masyarakat di Kecamatan Pulau Burung sebelum dibukanya lahan perkebunan kelapa hibrida hidup dengan mengandalkan hasil-hasil pertanian maupun hasil tangkapan ikan mereka yang kemudian dijual dan ditukarkan ke daerah-daerah sekitar seperti Sungai Guntung, Tembilahan, Tanjung Batu, dan Tanjung Balai Karimun untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Awal penyebutan kata Pulau Burung tidak dapat diketahui secara pasti kapan dan siapa yang menggunakannya untuk pertama kali. Pulau Burung sendiri sebenarnya merupakan penyebutan untuk sebuah pulau kecil yang berada tepat seberang Kecamatan Pulau Burung sekarang. Pulau Burung yang merupakan sebuah pulau kecil tersebut sering kali digunakan oleh para nelayan dari luar yang sekedar singgah ataupun lewat dari daerah yang masih tergabung dengan daratan Riau tersebut sebagai penunjuk lokasi. Dengan semakin ramainya pengunjung yang datang ke lokasi yang pada saat itu belum memiliki nama resmi, akhirnya nama Pulau Burung tadi digunakan sebagai penamaan lokasi oleh penduduk kepada para pendatang di Pulau Burung. Sehingga sampai sekarang Pulau Burung

menjadi nama resmi dari lokasi yang menjadi lahan perkebunan kelapa hibrida saat ini dan merupakan satu bagian dengan daratan Sumatera.

Sebelum dibukanya perusahaan perkebunan kelapa hibrida di Pulau Burung, jumlah penduduk di daerah ini masih sangat sedikit dan mayoritas penduduknya adalah suku Melayu yang merupakan suku asli di Propinsi Riau. Hal ini dimungkinkan karena sebelum masuknya perkebunan di daerah ini, Pulau Burung masih merupakan daerah yang terisolasi dikarenakan jalur transportasi ke Pulau Burung masih belum memadai dan sangat jarang sekali. Seiring dengan perkembangan dan masuknya perkebunan PT Riau Sakti United Plantations ke Pulau Burung, perlahan namun pasti perkembangan jalur transportasi mulai berkembang dan masih menggunakan sarana transportasi air. Hal ini dikarenakan struktur topografi Pulau Burung yang merupakan daerah sungai dan rawa-rawa sehingga cukup sulit untuk membangun jalan darat yang dapat menghubungkan langsung antara Pulau Burung dengan daerah-daerah terdekat maupun ke Ibukota Kabupaten dan Ibukota Provinsi.

Kegiatan perekonomian masyarakat di Pulau Burung perlahan mulai membaik seiring dengan pertumbuhan PT Riau Sakti United Plantations. Penduduk asli yang merupakan pemilik tanah mulai berani mendirikan pertokoan sebagai sarana penyalur kebutuhan perekonomian masyarakat di Pulau Burung. Keberadaan pertokoan di Pulau Burung tidak terlepas dari peranan para pendatang etnis Tionghoa yang rata-rata merupakan pedagang-pedagang kecil hingga skala besar di Pulau Burung.

### C. Gambaran Umum Desa Bangun Harjo Jaya

Desa Bangun Harjo Jaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Desa ini merupakan desa transmigran. Jika dilihat dari jenisnya, desa ini termasuk dalam jenis desa campuran (*geneologis dan teritorial*), karena struktur masyarakatnya merupakan campuran antara masyarakat transmigran pendatang (suku Jawa) serta transmigran tempatan (suku Melayu). Luas wilayah Desa Bangun Harjo Jaya adalah 2.300 Ha. Kemudian jumlah penduduknya sebanyak 954 jiwa.

Penduduk Desa Bangun Harjo Jaya mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Selain faktor geografis yang mendukung, rendahnya tingkat pendidikan penduduk sehingga mereka sulit mencari pekerjaan lain. Jenis pertanian yang terdapat di Desa Bangun Harjo Jaya yaitu Perkebunan Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit dan Karet. Pekerjaan lain penduduk Desa Bangun Harjo Jaya di antaranya yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pengrajin Rumah Tangga, Peternak dan Nelayan.

Adapun jarak antara Desa Bangun Harjo Jaya dengan ibukota Kecamatan Pulau Burung yaitu sekitar 25 Km, dan berjarak 278,9 Km dengan ibukota Kabupaten Indragiri Hilir, serta 229 Km dengan ibukota Provinsi Riau. Kemudian batas wilayah Desa Bangun Harjo Jaya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sri Danai Jaya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Manunggal Jaya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bukit Sari Intan Jaya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Keramat Jaya.

Secara administrasi jika dilihat dari kepemimpinan kepala desa yang ada di Desa Bangun Harjo Jaya sampai saat ini sudah beberapa kali mengalami pergantian kepala desa. Kepala Desa yang menjabat dan aktif saat ini adalah Muhammad Saerozi S.Pd dimulai tahun 2017 dan berakhir pada tahun 2022. Selama ini permasalahan pokok yang sering dihadapi dalam kepemimpinannya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena mereka kurang merasa memiliki akan nilai-nilai dari pembangunan itu sendiri atau tidak memiliki arti penting pembangunan untuk kebutuhannya.

### **1. Visi dan Misi Desa Bangun Harjo Jaya**

Adapun Visi dan Misi Desa Bangun Harjo Jaya yaitu sebagai berikut :

**Visi :** “Terwujudnya Desa Bangun Harjo Jaya sebagai Desa Terdepan dalam Mendukung Program Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.”

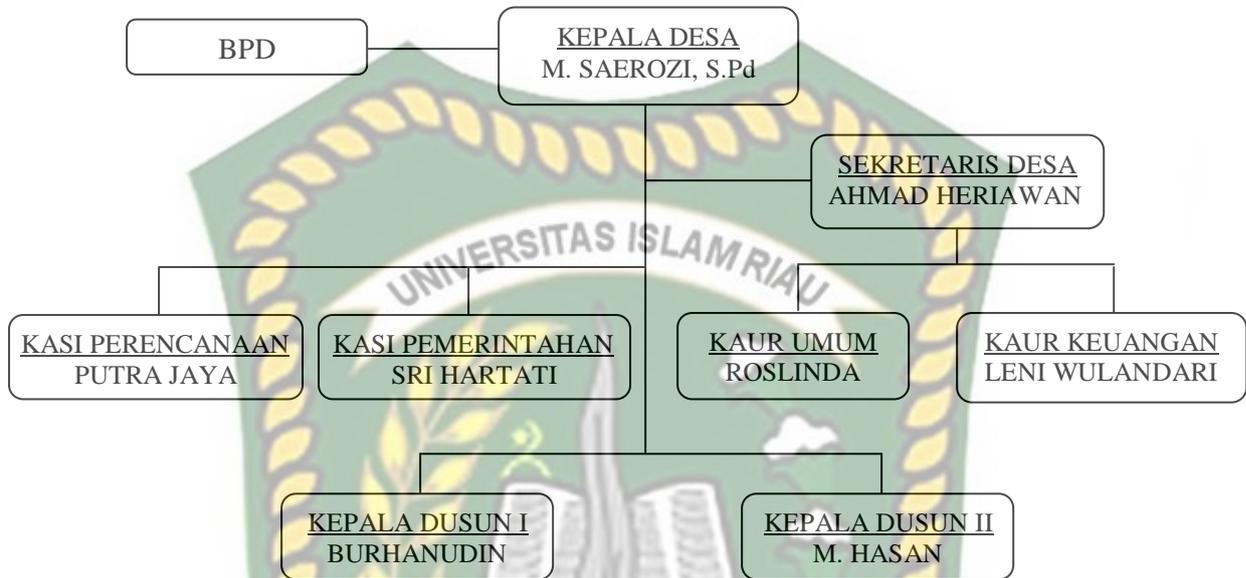
**Misi :**

1. Menciptakan pelayanan yang prima dan tertib administrasi dalam bidang pemerintahan .
2. Melaksanakan kegiatan gotong royong secara periodik dan rutin.
3. Mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, keagamaan dan membina serta mempertahankan kebudayaan yang mampu menghadapi perkembangan zaman.
4. Membangun kemandirian masyarakat dengan membangun sektor Usaha Kecil dan Menengah.
5. Melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

### **2. Struktur Organisasi Desa Bangun Harjo Jaya**

Adapun Susunan Organisasi Pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada gambar bagan berikut ini:

**Gambar IV.1 : Susunan Organisasi Pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir**



Sumber : Kantor Desa Bangun Harjo Jaya, 2021.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya

Selanjutnya adapun tugas dan fungsi masing-masing dari setiap bagian pada Pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya yaitu sebagai berikut:

#### a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan alat pemerintah dan pelayan masyarakat di desa. Tugas dan Fungsi

Kepala desa antara lain:

- Menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan memelihara serta mempertahankan keutuhan NKRI.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja di pemerintah desa.
- Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

- g) Menyelenggarakan administrasi yang baik.
- h) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.
- i) Menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dibantu oleh lembaga adat desa.
- j) Mengembangkan pendapatan masyarakat desa.
- k) Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- l) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa.
- m) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan.
- n) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada bupati melalui camat satu kali dalam setahun.
- o) Laporan pertanggungjawaban kepada BPD satu kali dalam setahun.
- p) Menginformasikan laporan penyelenggaraan keuangan dan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- q) Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada bupati melalui camat kepada BPD.

#### **b. Sekretaris Desa**

Sekretaris desa adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Tugas dan fungsi sekretaris desa antara lain:

- a) Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya serta mengkoordinasikan tugas-tugas kepala urusan.
- b) Memeberikan saran dan pendapat kepala desa
- c) Memimpin, mengakomodir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur kegiatan sekretaris desa.
- d) Merumuskan program kegiatan kepada kepala desa.
- e) Melaksanakan unsur surat menyurat kearsipan dan laporan.
- f) Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
- g) Menyusun rencana anggaran pendapatan belanja desa.
- h) Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.
- i) Melaksanakan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
- j) Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan.
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

#### **c. Kaur (Kepala Urusan)**

Kepala Urusan adalah berkedudukan sebagai unsur staf kesekretariatan.

Kepala Urusan bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan

kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa.

**d. Kasi (Kepala Seksi)**

Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan berdasarkan bidangnya. Kepala Seksi bertugas melaksanakan teknis kegiatan berdasarkan bidangnya yang dibuat oleh Kepala Urusan.

**e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

**f. Kadus (Kepala Dusun)**

Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah kerja dusun, bertugas untuk membantu kepala desa di wilayah kerja dusun dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut dengan penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 44 orang, yaitu terdiri dari 11 orang Pegawai Aparatur Desa, 7 orang BPD, 20 orang Tim Pelaksana Program DMIJ, dan 6 orang Tokoh Masyarakat. Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia responden.

##### 1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.1 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	34	77%
2	Perempuan	10	23%
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Penelitian, 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden dalam penelitian Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 34 orang jenis kelamin laki-laki (77%) dan 10 orang jenis kelamin perempuan (23%). Dari uraian tersebut terlihat jenis kelamin responden di dominasi oleh laki-laki yaitu dengan persentase (77%).

## 2. Tingkat Pendidikan

Pada identitas responden tingkat pendidikan dalam penelitian Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari tiga tingkat pendidikan yaitu SLTA, Diploma dan Sarjana. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	SLTA	28	64%
2	Diploma	4	9%
3	Sarjana	12	27%
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Penelitian, 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur

di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari paling banyak tingkat pendidikan SLTA 28 orang (64%), dan paling sedikit adalah tingkat Diploma yang berjumlah 4 orang (9%). Dari uraian diatas terlihat tingkat pendidikan responden di dominasi oleh SLTA yaitu dengan persentase (64%)

### 3. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu tindakan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden dalam penelitian Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.3 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Tingkat Usia**

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1	20 – 30	15	34%
2	31 – 40	16	36%
3	41 – 50	13	30%
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Penelitian, 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur

di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir yang berada pada usia 20-30 berjumlah 15 orang (34%), kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 16 orang (36%), dan responden yang berusia 41-50 berjumlah 13 orang (30%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada usia 31-40 tahun, yaitu dengan jumlah persentase (36%).

#### **B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir**

Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir pada penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari empat indikator yang meliputi Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pelaksanaan Rencana, dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana. Untuk mengetahui dan menganalisis penilaian tentang Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat dilihat dari indikator variabel berikut ini :

##### **1. Penyusunan Rencana**

Penyusunan Rencana adalah segenap usaha yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya dalam menyusun rencana pembangunan, pertimbangan dari aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembangunan dan hal yang terkait dengan rencana pembangunan. Adapun empat

item yang dinilai yaitu Mendengarkan aspirasi masyarakat, Menghadiri rapat atau musyawarah, Memberikan ide atau pendapat, dan Keterlibatan dalam penyusunan rencana.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden dari kuisisioner berjumlah 43 orang. Indikator Penyusunan Rencana terhadap Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Penyusunan Rencana terhadap Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Indikator	Kategori Penilaian					Jumlah
		ST	T	CT	KT	TT	
1	Mendengarkan aspirasi masyarakat	7	10	20	4	2	43
2	Menghadiri rapat atau musyawarah	7	9	20	6	1	43
3	Memberikan ide atau pendapat	5	9	17	10	2	43
4	Keterlibatan dalam penyusunan rencana	4	8	20	8	3	43
Jumlah		23	36	77	28	8	172
Total / rata-rata		172					

Sumber : Data Olahan 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 43 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Penyusunan Rencana, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yaitu terdiri dari : mendengarkan aspirasi masyarakat dapat disimpulkan bahwa kategori penilaian terbanyak adalah 20 orang terbilang cukup terlaksana ( CT ) sedangkan untuk

angka terendah dari item penilaian hanya terdapat 2 orang yang termasuk dalam kategori tidak terlaksana ( TT ).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dalam indikator Penyusunan Rencana dikategorikan Cukup Terlaksana, dengan standar skala pengukuran ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan seluruh responden dalam penelitian ini.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Saerozi, S.Pd selaku Kepala Desa Bangun Harjo Jaya mengenai indikator Penyusunan Rencana, beliau menjelaskan bahwa:

*“Infrastruktur ini karena pelaksanaan kegiatan program DMIJ yang dilaksanakan berdasarkan infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya, berdasarkan hasil dari dokumen dan musyawarah rencana pembangunan program DMIJ yang kemudian di tuangkan ke dalam RKPDesa kerja pemerintahan desa tahunan, kemudian dituangkan berdasarkan APBDes, kemudian ketua pelaksana DMIJ melaksanakan kegiatan yang sebagaimana tertuang didalam dokumen pembangunan tersebut, yakni pembangunan dalam program DMIJ ini mengacu pada RKPDes Desa Bangun Harjo Jaya. Dalam penyusunan rencana berdasarkan yang pertama yaitu RPJMDes, yang kedua yaitu berdasarkan usulan dari masyarakat, yang ketiga berdasarkan penyusunan RKPDes, kemudian dilanjutkan dengan Desain atau penyusunan desain RAB, setelah itu baru dilakukan pengesahan APBDes tersebut”. (Wawancara : Senin, 12 Juli 2021).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan rencana dilakukan berdasarkan yang pertama yaitu RPJMDes, yang kedua yaitu berdasarkan usulan dari masyarakat, yang ketiga berdasarkan

penyusunan RKPDes, kemudian dilanjutkan dengan desain atau penyusunan desain RAB, setelah itu baru dilakukan pengesahan APBDes.

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator Penyusunan Rencana, peneliti melihat bahwa dalam penyusunan rencana dilakukan berdasarkan yang pertama yaitu RPJMDes, yang kedua yaitu berdasarkan usulan dari masyarakat, yang ketiga berdasarkan penyusunan RKPDes, kemudian dilanjutkan dengan desain atau penyusunan desain RAB, setelah itu baru dilakukan pengesahan APBDes.

Pelaksanaan kegiatan program DMIJ yang dilaksanakan berdasarkan infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya yaitu berdasarkan hasil dari dokumen dan musyawarah rencana pembangunan program DMIJ yang kemudian di tuangkan ke dalam RKPDesa kerja pemerintahan desa tahunan, kemudian dituangkan berdasarkan APBDes, kemudian ketua pelaksana DMIJ melaksanakan kegiatan yang sebagaimana tertuang didalam dokumen pembangunan tersebut, yakni pembangunan dalam program DMIJ ini mengacu pada RKPDes Desa Bangun Harjo Jaya.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan seluruh responden melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Desa Bangun Harjo Jaya, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Penyusunan Rencana dalam penelitian Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir berada pada kategori penilaian Cukup Terlaksana.

## 2. Penetapan Rencana

Penetapan rencana adalah hak kewenangan pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya dalam menetapkan rencana pembangunan yang telah disaring oleh pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya. Adapun empat item yang dinilai yaitu Menghadiri rapat penetapan rencana pembangunan, Menyaksikan penetapan rencana pembangunan, Memberikan saran dan ide pemikiran, dan Terlibat dalam pengambilan keputusan penetapan rencana pembangunan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 43 orang responden mengenai indikator Penetapan Rencana terhadap Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Penetapan Rencana terhadap Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian					Jumlah
		ST	T	CT	KT	TT	
1	Menghadiri rapat penetapan rencana pembangunan	7	10	20	4	2	43
2	Menyaksikan penetapan rencana pembangunan	7	9	20	6	1	43
3	Memberikan saran dan ide pemikiran	5	9	17	10	2	43
4	Terlibat dalam pengambilan keputusan penetapan rencana pembangunan	4	8	20	8	3	43
Jumlah		23	36	77	28	8	172
Rata-rata		6	9	19	7	2	43
Persentase		14%	21%	44%	16%	5%	100%

Sumber : Data Olahan 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 43 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Penetapan Rencana, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yaitu terdiri dari : Sangat Terlaksana dengan jumlah persentase 14%, Terlaksana dengan jumlah persentase 21%, selanjutnya Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 44%, Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 16%, dan Tidak Terlaksana dengan jumlah persentase 5%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dalam indikator Penetapan Rencana dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 44%, dengan standar skala pengukuran 41% - 60%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan seluruh responden dalam penelitian ini.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Saerozi, S.Pd selaku Kepala Desa Bangun Harjo Jaya mengenai indikator Penetapan Rencana, beliau menjelaskan bahwa:

*“Penetapan Rencana berdasarkan daftar usulan infrastuktur yang akan dibangun. Infrastruktur ini karena pelaksanaan kegiatan program DMIJ yang dilaksanakan berdasarkan infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya, berdasarkan hasil dari dokumen dan musyawarah rencana pembangunan program DMIJ yang kemudian di tuangkan ke dalam RKPDesa kerja pemerintahan desa tahunan, kemudian dituangkan berdasarkan APBDes, kemudian ketua pelaksana DMIJ melaskanakan kegiatan yang sebagaimana tertuang didalam dokumen pembangunan tersebut”.*  
(Wawancara : Senin, 12 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan Penetapan Rencana yaitu berdasarkan daftar usulan infrastuktur yang akan dibangun. Pelaksanaan kegiatan program DMIJ yang dilaksanakan berdasarkan infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya yaitu berdasarkan hasil dari dokumen dan musyawarah rencana pembangunan program DMIJ yang kemudian di tuangkan ke dalam RKPDesa kerja pemerintahan desa tahunan, kemudian dituangkan berdasarkan APBDes, kemudian ketua pelaksana DMIJ melaksanakan kegiatan yang sebagaimana tertuang didalam dokumen pembangunan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator Penetapan Rencana, peneliti melihat bahwa dalam melakukan Penetapan Rencana yaitu berdasarkan daftar usulan infrastuktur yang akan dibangun. Pelaksanaan kegiatan program DMIJ yang dilaksanakan berdasarkan infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya yaitu berdasarkan hasil dari dokumen dan musyawarah rencana pembangunan program DMIJ yang kemudian di tuangkan ke dalam RKPDesa kerja pemerintahan desa tahunan, kemudian dituangkan berdasarkan APBDes, kemudian ketua pelaksana DMIJ melaksanakan kegiatan yang sebagaimana tertuang didalam dokumen pembangunan tersebut, yakni pembangunan dalam program DMIJ ini mengacu pada RKPDes Desa Bangun Harjo Jaya.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan seluruh responden melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Desa Bangun Harjo Jaya, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Penetapan Rencana dalam penelitian Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)

Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir berada pada kategori penilaian Cukup Terlaksana.

### 3. Pelaksanaan Rencana

Pelaksanaan rencana adalah hal yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Bangun Harjo Jaya saat pembangunan sedang berlangsung. Dilakukan untuk mengontrol agar pembangunan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun empat item yang dinilai yaitu Melibatkan masyarakat dalam pembangunan, Melakukan pengawasan dalam pembangunan, Pengarahan dalam melakukan pembangunan, dan Berperan aktif dalam melakukan pembangunan yang dilaksanakan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 43 orang responden mengenai indikator Pelaksanaan Rencana terhadap Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pelaksanaan Rencana terhadap Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian					Jumlah
		ST	T	CT	KT	TT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melibatkan masyarakat dalam pembangunan	7	10	20	4	2	43
2	Melakukan pengawasan dalam pembangunan	7	9	20	6	1	43
3	Pengarahan dalam melakukan pembangunan	5	9	17	10	2	43

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Berperan aktif dalam melakukan pembangunan yang dilaksanakan	4	8	20	8	3	43
Jumlah		23	36	77	28	8	172
Rata-rata		6	9	19	7	2	43
Persentase		14%	21%	44%	16%	5%	100%

Sumber : Data Olahan 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 43 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Pelaksanaan Rencana, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yaitu terdiri dari : Sangat Terlaksana dengan jumlah persentase 14%, Terlaksana dengan jumlah persentase 21%, selanjutnya Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 44%, Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 16%, dan Tidak Terlaksana dengan jumlah persentase 5%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dalam indikator Pelaksanaan Rencana dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 44%, dengan standar skala pengukuran 41% - 60%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan seluruh responden dalam penelitian ini.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Saerozi, S.Pd selaku Kepala Desa Bangun Harjo Jaya mengenai indikator Pelaksanaan Rencana, beliau menjelaskan bahwa:

*“Bentuk pelaksanaannya lumayan banyak, yang jelas persiapan pelaksanaan, yang kedua yaitu pengadaan barang dan jasa, yang ketiga pelaksanaan revisi kegiatan APBDes, kemudian dokumentasi kegiatan desa, dan penyelesaian kegiatan musyawarah desa. Bentuk hasil nyata*

*yang sudah terealisasi dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur program DMIJ di Desa Bangun Harjo Jaya yaitu pagar kantor desa, kantor BPD, semenisasi jalan poros, dan jembatan penyebrangan antara Desa Bangun Harjo Jaya menuju Desa Sri Danai Jaya. Kami melibatkan masyarakat dalam Pelaksanaan Program DMIJ, yaitu masyarakat mengikuti musyawarah desa, kemudian ikut berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan, dan ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur". (Wawancara : Senin, 12 Juli 2021).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur pada program DMIJ, pemerintah desa Bangun Harjo Jaya bersama tim pelaksana program DMIJ pertama-tama melakukan persiapan pelaksanaan program DMIJ, yang kedua yaitu melakukan pengadaan barang dan jasa, yang ketiga yaitu pelaksanaan revisi kegiatan APBDes, kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi kegiatan desa, dan selanjutnya melakukan penyelesaian kegiatan musyawarah desa.

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator Pelaksanaan Rencana, peneliti melihat bahwa bentuk pelaksanaan rencana pembangunan infrastruktur pada program DMIJ tersebut lumayan banyak, yang pertama yaitu pemerintah desa Bangun Harjo Jaya bersama tim pelaksana program DMIJ melakukan persiapan pelaksanaan program DMIJ, yang kedua yaitu melakukan pengadaan barang dan jasa, yang ketiga yaitu pelaksanaan revisi kegiatan APBDes, kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi kegiatan desa, dan selanjutnya melakukan penyelesaian kegiatan musyawarah desa.

Adapun bentuk hasil nyata yang sudah terealisasi dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur program DMIJ di Desa Bangun Harjo Jaya yaitu

pembangunan pagar kantor desa, pembangunan gedung BPD, pembangunan semenisasi jalan poros, dan pembangunan jembatan penyebrangan antara Desa Bangun Harjo Jaya menuju Desa Sri Danai Jaya. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada program DMIJ, pemerintah desa Bangun Harjo Jaya juga turut melibatkan masyarakat, yaitu masyarakat di undang untuk mengikuti musyawarah desa, kemudian ikut berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan, dan ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan seluruh responden melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Desa Bangun Harjo Jaya, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Pelaksanaan Rencana dalam penelitian Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir berada pada kategori penilaian Cukup Terlaksana.

#### **4. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana**

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana adalah hal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya setelah pembangunan selesai dilakukan perbandingan antara rencana dengan hasil. Adapun empat item yang dinilai yaitu Meninjau hasil dengan rencana pembangunan, Membukukan arsip pembangunan, Melakukan pembahasan terhadap pembangunan yang telah terlaksana, dan Mengidentifikasi kelemahan dalam proses pembangunan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 43 orang responden mengenai indikator Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana terhadap Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pelaksanaan Rencana terhadap Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian					Jumlah
		ST	T	CT	KT	TT	
1	Meninjau hasil dengan rencana pembangunan	7	10	20	4	2	43
2	Membukukan arsip pembangunan	7	9	20	6	1	43
3	Melakukan pembahasan terhadap pembangunan yang telah terlaksana	5	9	17	10	2	43
4	Mengidentifikasi kelemahan dalam proses pembangunan	4	8	20	8	3	43
Jumlah		23	36	77	28	8	172
Rata-rata		6	9	19	7	2	43
Persentase		14%	21%	44%	16%	5%	100%

Sumber : Data Olahan 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 43 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yaitu terdiri dari : Sangat Terlaksana dengan jumlah persentase 14%, Terlaksana dengan jumlah persentase 21%, selanjutnya Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 44%,

Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 16%, dan Tidak Terlaksana dengan jumlah persentase 5%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dalam indikator Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 44%, dengan standar skala pengukuran 41% - 60%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan seluruh responden dalam penelitian ini.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Saerozi, S.Pd selaku Kepala Desa Bangun Harjo Jaya mengenai indikator Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana, beliau menjelaskan bahwa:

*“Evaluasi pasti ada, yang pertama yaitu laporan kemajuan target pembangunan berdasarkan rencana yang sudah dibuat atau yang sudah disepakati, adanya pembahasan kendala dan permasalahan yang terjadi ketika dilapangan, selanjutnya yaitu tersusunnya rencana yang detail untuk yang berikutnya. Temuan lainnya yaitu adanya hasil kerja yang kurang sempurna atau kurang maksimal atau kurang sesuai. Kalau kelemahannya yaitu sulitnya mendapat material karena aksesnya lumayan sulit terjangkau karena desa kita sangat jauh jaraknya dari kecamatan dan kabupaten, selain itu pagu dana tidak mencukupi dari anggaran pada program DMIJ untuk kegiatan infrastruktur, sehingga agak sedikit terhambat proses pelaksanaan pembangunannya. Hambatannya adalah Faktor cuaca yaitu ketika hujan pekerja tidak dapat bekerja, dan akses jalan pun menjadi rusak karena kondisi jalan masih tanah, sehingga pengangkutan material menjadi terhambat, selain itu pekerja sedikit sulit dikendalikan, dan lambatnya pengesahan APBDes. ”. (Wawancara : Senin, 12 Juli 2021).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh tim pelaksana program DMIJ yang pertama yaitu laporan kemajuan target pembangunan berdasarkan rencana yang sudah dibuat atau yang

sudah disepakati, kemudian mengadakan pembahasan kendala dan permasalahan yang terjadi ketika dilapangan, selanjutnya yaitu tersusunnya rencana yang detail untuk yang berikutnya. Temuan lainnya yaitu adanya hasil kerja yang kurang sempurna atau kurang maksimal serta kurang sesuai.

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana, peneliti melihat bahwa evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan dalam program DMIJ yang dilakukan oleh tim pelaksana program DMIJ yang pertama yaitu laporan kemajuan target pembangunan berdasarkan rencana yang sudah dibuat atau yang sudah disepakati, kemudian mengadakan pembahasan kendala dan permasalahan yang terjadi ketika dilapangan, selanjutnya yaitu tersusunnya rencana yang detail untuk yang berikutnya. Temuan lainnya yaitu adanya hasil kerja yang kurang sempurna atau kurang maksimal.

Sementara untuk kelemahannya yaitu sulitnya mendapat material karena aksesnya lumayan sulit terjangkau karena desa Bangun Harjo Jaya lumayan jauh jaraknya dari kecamatan dan sangat jauh dari kabupaten, selain itu pagu dana tidak mencukupi dari anggaran pada program DMIJ untuk kegiatan infrastruktur, sehingga menjadi sedikit terhambat proses pelaksanaan pembangunannya. Kemudian hambatan yang dihadapi adalah faktor cuaca yaitu ketika hujan turun, para pekerja tidak dapat bekerja, dan akses jalan pun menjadi rusak karena kondisi jalan masih tanah, sehingga pengangkutan material menjadi terhambat, selain itu juga terjadi keterlambatan dalam pengesahan APBDes Desa Bangun Harjo Jaya.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan seluruh responden melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Desa Bangun Harjo Jaya, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana dalam penelitian Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir berada pada kategori penilaian Cukup Terlaksana.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden terhadap penelitian Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Indikator	Kategori Penilaian					Jumlah
		ST	T	CT	KT	TT	
1	Penyusunan Rencana	6 (14%)	9 (21%)	19 (44%)	7 (16%)	2 (5%)	43
2	Penetapan Rencana	6 (14%)	9 (21%)	19 (44%)	7 (16%)	2 (5%)	43
3	Pelaksanaan Rencana	6 (14%)	9 (21%)	19 (44%)	7 (16%)	2 (5%)	43
4	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana	6 (14%)	9 (21%)	19 (44%)	7 (16%)	2 (5%)	43
Jumlah		24	36	76	28	8	172
Rata-rata		6	9	19	7	2	43
Persentase		14%	21%	44%	16%	5%	100%

Sumber : Data Olahan, 2021.

Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden terhadap Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir diatas, untuk kategori penilaian Sangat Terlaksana yaitu sebesar 14%, untuk kategori penilaian Terlaksana adalah sebesar 21%, untuk kategori penilaian Cukup Terlaksana adalah sebesar 44%, untuk kategori penilaian Kurang Terlaksana adalah sebesar 16%, dan untuk kategori penilaian Tidak Terlaksana adalah sebesar 5%, dari total keseluruhan responden sebanyak 43 orang.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa tanggapan responden terhadap penelitian Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dikategorikan Cukup Terlaksana dengan total persentase sebesar 44%. Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 41% - 60% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Berdasarkan analisis peneliti, penyusunan rencana pembangunan infrastruktur dalam program DMIJ dilakukan berdasarkan yang pertama yaitu RPJMDes, yang kedua yaitu berdasarkan usulan dari masyarakat, yang ketiga berdasarkan penyusunan RKPDes, kemudian dilanjutkan dengan desain atau penyusunan desain RAB, setelah itu baru dilakukan pengesahan APBDes. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam program DMIJ di Desa Bangun Harjo Jaya yaitu berdasarkan hasil dari dokumen dan musyawarah rencana pembangunan program DMIJ yang kemudian di tuangkan ke dalam RKPDesa kerja pemerintahan desa tahunan, kemudian dituangkan berdasarkan

APBDes, kemudian ketua pelaksana DMIJ melaksanakan kegiatan yang sebagaimana tertuang didalam dokumen pembangunan tersebut, yakni pembangunan dalam program DMIJ ini mengacu pada RKPDes Desa Bangun Harjo Jaya.

Kemudian dalam melakukan penetapan rencana pembangunan infrastruktur pada program DMIJ yaitu berdasarkan daftar usulan infrastuktur yang akan dibangun. Pelaksanaan kegiatan program DMIJ yang dilaksanakan berdasarkan infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya yaitu berdasarkan hasil dari dokumen dan musyawarah rencana pembangunan program DMIJ yang kemudian di tuangkan ke dalam RKPDesa kerja pemerintahan desa tahunan, kemudian dituangkan berdasarkan APBDes, kemudian ketua pelaksana DMIJ melaksanakan kegiatan yang sebagaimana tertuang didalam dokumen pembangunan tersebut, yakni pembangunan dalam program DMIJ ini mengacu pada RKPDes Desa Bangun Harjo Jaya.

Bentuk pelaksanaan rencana pembangunan infrastruktur pada program DMIJ tersebut lumayan banyak, yang pertama yaitu pemerintah desa Bangun Harjo Jaya bersama tim pelaksana program DMIJ melakukan persiapan pelaksanaan program DMIJ, yang kedua yaitu melakukan pengadaan barang dan jasa, yang ketiga yaitu pelaksanaan revisi kegiatan APBDes, kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi kegiatan desa, dan selanjutnya melakukan penyelesaian kegiatan musyawarah desa. Adapun bentuk hasil nyata yang sudah terealisasi dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur program DMIJ di Desa Bangun Harjo Jaya yaitu pembangunan pagar kantor desa, pembangunan gedung

BPD, pembangunan semenisasi jalan poros, dan pembangunan jembatan penyebrangan antara Desa Bangun Harjo Jaya menuju Desa Sri Danai Jaya. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada program DMIJ, pemerintah desa Bangun Harjo Jaya juga turut melibatkan masyarakat, yaitu masyarakat di undang untuk mengikuti musyawarah desa, kemudian ikut berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan, dan ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya.

Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan dalam program DMIJ yang dilakukan oleh tim pelaksana program DMIJ yang pertama yaitu laporan kemajuan target pembangunan berdasarkan rencana yang sudah dibuat atau yang sudah disepakati, kemudian mengadakan pembahasan kendala dan permasalahan yang terjadi ketika dilapangan, selanjutnya yaitu tersusunnya rencana yang detail untuk kegiatan berikutnya. Temuan lainnya yaitu adanya hasil kerja yang kurang sempurna atau kurang maksimal. Sementara untuk kelemahannya yaitu sulitnya mendapat material karena aksesnya lumayan sulit terjangkau karena desa Bangun Harjo Jaya lumayan jauh jaraknya dari kecamatan dan sangat jauh dari kabupaten, selain itu pagu dana tidak mencukupi dari anggaran pada program DMIJ untuk kegiatan infrastruktur, sehingga menjadi sedikit terhambat proses pelaksanaan pembangunannya. Kemudian hambatan yang dihadapi adalah faktor cuaca yaitu ketika hujan turun, para pekerja tidak dapat bekerja, dan akses jalan pun menjadi rusak karena kondisi jalan masih tanah, sehingga pengangkutan material menjadi terhambat, selain itu juga terjadi keterlambatan dalam pengesahan APBDes Desa Bangun Harjo Jaya.

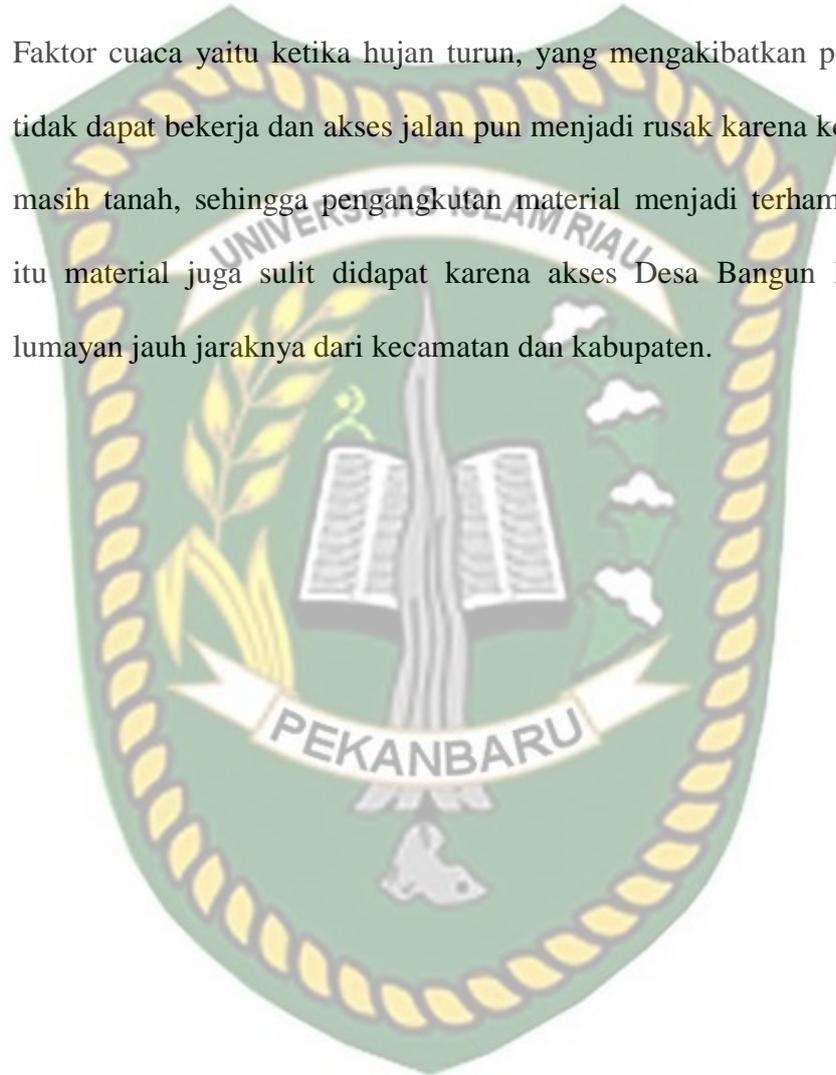
Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada program DMIJ tersebut, pemerintah desa Bangun Harjo Jaya bersama dengan Tim Pelaksana Program DMIJ berharap kedepannya ada perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan program DMIJ, yang pertama yaitu menyiapkan perencanaan sebaik mungkin dari perencanaan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, serta pengesahan APBDes agar dapat lebih cepat dilaksanakan, yang kedua yaitu berharap adanya penambahan pagu dana khusus pembangunan infrastruktur program DMIJ dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang ketiga yaitu bentuk pengawasan dan pendampingan dari pihak pendamping dan dinas PMD Indragiri Hilir agar bisa lebih maksimal, dan yang terakhir yaitu pelaksana kegiatan dilapangan harus sigap dan lebih teliti dalam meninjau dan mengevaluasi pekerja di lapangan, serta melaksanakan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) bidang sarana infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya dengan lebih baik lagi.

**C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu sebagai berikut:

1. Pagu dana dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak mencukupi dari anggaran pada program DMIJ untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, sehingga menjadi sedikit terhambat proses pelaksanaan pembangunannya.

2. Terjadi keterlambatan dalam pengesahan APBDes Desa Bangun Harjo Jaya, sehingga proses pelaksanaan program DMIJ bidang pembangunan sarana infrastruktur menjadi molor dan lama.
3. Faktor cuaca yaitu ketika hujan turun, yang mengakibatkan para pekerja tidak dapat bekerja dan akses jalan pun menjadi rusak karena kondisi jalan masih tanah, sehingga pengangkutan material menjadi terhambat. Selain itu material juga sulit didapat karena akses Desa Bangun Harjo Jaya lumayan jauh jaraknya dari kecamatan dan kabupaten.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, banyak yang telah peneliti temui berdasarkan observasi langsung ke lapangan, wawancara dan kuisioner yang telah peneliti berikan kepada seluruh responden yang diperlukan dengan empat indikator yaitu Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pelaksanaan Rencana, dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana. Maka dari itu peneliti telah menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pada indikator Penyusunan Rencana bahwa pelaksanaan program DMIJ bidang pembangunan sarana infrastruktur disusun berdasarkan RPJMDes, kemudian usulan dari masyarakat, kemudian penyusunan RKPDes, selanjutnya desain atau penyusunan desain RAB, setelah itu baru dilakukan pengesahan APBDes.
2. Pada indikator Penetapan Rencana bahwa pelaksanaan program DMIJ bidang pembangunan sarana infrastruktur ditetapkan berdasarkan daftar usulan infrastuktur yang akan dibangun.
3. Pada indikator Pelaksanaan Rencana bahwa dalam pelaksanaan program DMIJ bidang pembangunan sarana infrastruktur, pemerintah desa Bangun Harjo Jaya bersama tim pelaksana program DMIJ mengawalinya dengan melakukan persiapan pelaksanaan program DMIJ, selanjutnya melakukan

pengadaan barang dan jasa, kemudian pelaksanaan revisi kegiatan APBDes, kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi kegiatan desa, dan selanjutnya melakukan penyelesaian kegiatan musyawarah desa.

4. Pada indikator Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana bahwa evaluasi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program DMIJ bidang sarana infrastruktur yaitu laporan kemajuan target pembangunan berdasarkan rencana yang sudah dibuat atau yang sudah disepakati, kemudian mengadakan pembahasan kendala dan permasalahan yang terjadi ketika dilapangan, selanjutnya yaitu tersusunnya rencana yang detail untuk kegiatan berikutnya.
5. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :
  - 1) Pagu dana dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak mencukupi dari anggaran pada program DMIJ untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, sehingga menjadi sedikit terhambat proses pelaksanaan pembangunannya.
  - 2) Terjadi keterlambatan dalam pengesahan APBDes Desa Bangun Harjo Jaya, sehingga proses pelaksanaan program DMIJ bidang pembangunan sarana infrastruktur menjadi molor dan lama.
  - 3) Faktor cuaca yaitu ketika hujan turun, yang mengakibatkan para pekerja tidak dapat bekerja dan akses jalan pun menjadi rusak karena kondisi jalan masih tanah, sehingga pengangkutan material menjadi

terhambat. Selain itu material juga sulit didapat karena akses Desa Bangun Harjo Jaya lumayan jauh jaraknya dari kecamatan dan kabupaten.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian adalah :

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat menambah pagu dana khusus untuk kegiatan program DMIJ bidang pembangunan sarana infrastruktur di Desa Bangun Harjo Jaya.
2. Diharapkan Pemerintah Desa Bangun Harjo Jaya mempercepat pengesahan APBDDes Desa Bangun Harjo Jaya, sehingga proses pelaksanaan program DMIJ bidang pembangunan sarana infrastruktur dapat dilaksanakan dengan lebih awal dan cepat selesai.
3. Diharapkan Tim Pelaksana Program DMIJ mencari supplier atau pemasok material yang paling dekat lokasinya dengan Desa Bangun Harjo Jaya, sehingga pengangkutan material menjadi dekat dan mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- A.D. Belinfante & Burhanudin Batoeh. 2003. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Bandung: Binacipta.
- Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Ancok, D. 2012. Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi. Penerbit Erlangga.
- Afifuddin, 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Faried. 2015. Teori dan Konsep Administrasi. Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi, Rajawali Pres, Jakarta
- Anggraini, Jum, 2010, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, Lincoln, dkk. 2011. Strategi pembangunan perdesaan berbasis lokal.UPP STIM YKPN (Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN), Yogyakarta
- Brantakusumah, Deddy Supriady, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Daft, Richard. 2006. Management. Jakarta: Salemba Empat.
- Dahlan, Alwi, dkk. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.
- Darwis, Herman. 2009. Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.13, No 13, September 2009, Hal 12.
- Fahmi, Irham. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta
- Fajlurrahman, Masriadi. 2010. Teori-Teori Mutakhir Administrasi Publik. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang.
- Fayol, Hendry. 2013. Pengantar Administrasi dan Fungsi-Fungsi Manajemen. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Gitosudarmo, Indriyo. 2000. Manajemen Pemasaran. Yogyakarta: BPFE UGM.



Widjaja. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonom Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yuwono, Teguh. 2001. Manajemen Otonomi Daerah, Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru. Semarang: PT. Gramedia.

Zulkifli. 2009. Fungsi-fungsi Manajemen. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

**Sumber Internet:**

Kementerian Dalam Negeri. Kabupaten Indragiri Hilir. (<http://www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/14/name/riau/detail/1404/indragirihilir.com>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2017).

<https://www.nu.or.id/post/read/114255/wujudkan-desa-maju-dan-mandiri--pemerintah-dorong-bumdes--naik-kelas>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2020

**Dokumen-dokumen:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kabupaten Indragiri Hilir. 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa Maju Inhil Jaya. Tembilahan: Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Kabupaten Indragiri Hilir. 2015. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Desa Maju Inhil Jaya. Tembilahan: Kabupaten Indragiri Hilir.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.